

SKRIPSI

ANALISIS PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI SIMPAN PINJAM KELOMPOK PEREMPUAN (SPP) DALAM MENGURANGI TINGKAT KEMISKINAN (STUDI KASUS UPK PNPM MANDIRI PERDESAAN DI KECAMATAN KLUET UTARA ACEH SELATAN)



Disusun Oleh:

**Ratna Wati
NIM. 160604100**

**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M / 1442 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ratna Wati
NIM : 160604100
Program Studi : Ilmu Ekonomi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 23 Juni 2021

Yang Menyatakan,



Ratna Wati

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ilmu Ekonomi

Dengan Judul:

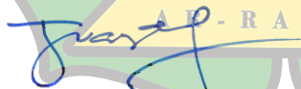
**Analisis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Simpan
Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Dalam Mengurangi
Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus UPK PNPM Mandiri
Perdesaan di Kecamatan Kluet Utara Aceh Selatan)**

Disusun Oleh:

Ratna Wati
160604100

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I




Dr. Juanda, SE., MM
NIP. 198212312005011005

Pembimbing II



Rachmi Meutia, M.Sc
NIP. 198803192019032013

Mengetahui Ketua
Program Studi Ilmu Ekonomi 

Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si
NIP. 197204281999031005

**LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL
SKRIPSI**

Ratna Wati
NIM. 160604100

Dengan Judul:

**Analisis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Simpan
Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Dalam Mengurangi Tingkat
Kemiskinan (Studi Kasus UPK PNPM Mandiri Perdesaan di
Kecamatan Kluet Utara Aceh Selatan)**

Telah Diseminarkan oleh Program Studi Strata Satu (S1)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Strata satu (S-1) dalam bidang
Ilmu Ekonomi

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 21 Januari 2021 M
8 Jumadil Akhir 1442 H

Banda Aceh

Tim Penilai Seminar Hasil Skripsi

Ketua,



Dr. Juanda, SE.,MM

NIP. 198212312005011005

Sekretaris,



Rachmi Meutia, M.Sc

NIP. 198803192019032013

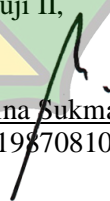
Penguji I,



Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si

NIP. 197204281999031005

Penguji II,



Safnina Sukma, SE., M.Si

NIP. 198708102019032013

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Zaki Fuad, M.Ag

NIP. 19640141992031003



**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN
AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Ratna Wati
NIM : 160604100
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ilmu Ekonomi
E-mail : 160604100@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir KKU Skripsi
yang berjudul:

Analisis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus UPK PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Kluet Utara Aceh Selatan)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 23 Juni 2021

Penulis

Ratna Wati
NIM. 160604101

Mengetahui,
Pembimbing I

Dr. Juanda, SE, MM
NIP. 198212312005011005

Pembimbing II

Rachmi Meutia, M.Sc
NIP. 198803192019032013

KATA PENGANTAR



Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberi nikmat, karunia, serta rahmat-Nya kepada seluruh makhluk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, yang berjudul “Analisis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus UPK PNPM Mandiri perdesaan di Kecamatan Kluet Utara Aceh Selatan)”

Shalawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW, keluarga serta para sahabat beliau sekalian. Keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan doa dari semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas segala bantuan, saran dan kritikan yang telah di berikan demi kesempurnaan skripsi ini, kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.
2. Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si selaku ketua program studi Ilmu Ekonomi dan Marwiyati, SE., MM. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Ekonomi.

3. Muhammad Arifin, Ph.D selaku Ketua Laboratorium dan Akmal Riza,S.E., M.Si selaku Sekretaris Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Dr. Juanda, SE., MM. selaku pembimbing I dan Rachmi Meutia, M.Sc., selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan banyak masukan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. Muhammad Adnan, SE, M.Si. sebagai penguji I dan Safnina Sukma, SE., M.Si. Sebagai penguji II yang telah memberikan waktu dan memberikan masukan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Evri Yenni, SE., M. Si selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan program Studi Strata Satu (S1) Ilmu Ekonomi. Dan Seluruh Dosen dan staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, khususnya Program Studi Ilmu Ekonomi yang telah memberikan ilmu, pengalaman, arahan serta perhatiannya kepada peulis selama mengikuti perkuliahan hingga selesainya skripsi ini.
7. Sarjana selaku ketua UPK Kluet Utara dan Ibu Lilis Farnita S.Pd. selaku Sekretaris UPK Kluet Utaradan semua responden yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam melakukan Tanya jawab seputaran informasi UPK Kluet Utara.

8. Ayahanda dan ibunda tercinta ayah Darwis dan ibu Nazaridah yang telah menjadi Orang Tua terhebat, telah bersusah payah membesarkan dan merawat penulis serta tidak pernah lelah memberikan kasih sayang dan dukungan yang luar biasa, baik materi maupun doanya, semoga menjadi ibadah bagi keduanya. Terima kasih juga buat adik Tarmadi Saputra yang selalu memberi cinta, motivasi, nasehat, perhatian dan kasih sayang serta Doa yang tentu tidak akan bisa terbalaskan dengan apa pun sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
9. Sahabat-sahabat terbaik, Iper, Lilis Kaimi, Yusra, Iyma, Lela, kak je, Salmi, Adli gunawan selaku sahabat sahabat seperjuangan saat di bangku perkuliahan dan semua pihak yang telah membantu dan memberi motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
10. Terimakasih kepada pihak-pihak yang tidak bisa di sebutkan satu persatu.

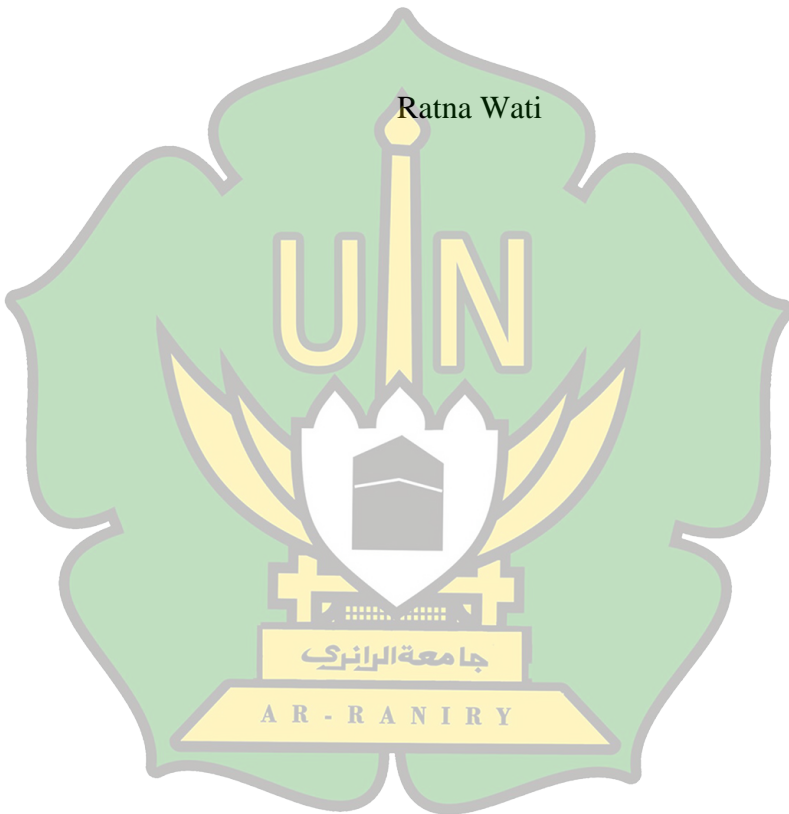
Hanya Allah SWT yang dapat membalas segala bentuk kebaikan dari semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, bila terdapat kekurangan dan kesalah pahaman dalam penulisan skripsi ini, dengan kerendahan hati penulis sangat

mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Banda Aceh, 23 Juni 2021

Penulis,



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak Dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ž	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ُ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ي / َ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
ي ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
ي ُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutoh (ة)

Transliterasi untuk ta marbutoh ada dua.

- a. Ta *marbutoh* (ة) hidup

Ta *marbutoh* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutoh* (ة) mati

Ta *marbutoh* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

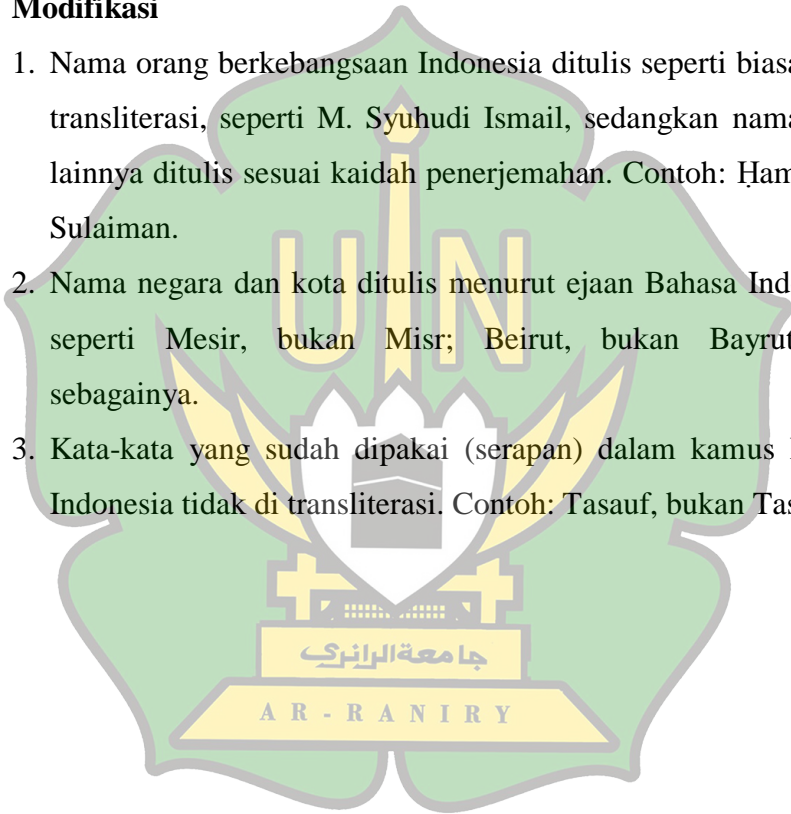
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutoh* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutoh* (ة) itu ditransliterasikan dengan h. Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl/ raudatulatfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	: <i>al-Madīnah al-Munawwarah/ al-MadīnatulMunawwarah</i>
طَلْحَة	: <i>Talhah</i>

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak di transliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



ABSTRAK

Nama Mahasiswa : Ratna Wati
NIM : 160604100
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Illmu Ekonomi
Judul : Analisis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus UPK PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Kluet Utara Aceh Selatan)
Tanggal Sidang : 21 Januari 2021
Pembimbing I : Dr. Juanda, SE.,MM
Pembimbing II : Rachmi Meutia, M.Sc

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran SPP dalam memberdayakan ekonomi masyarakat di Kluet Utara guna mengurangi tingkat kemiskinan dan untuk mengetahui kendala pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kluet Utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui penyebaran angket, wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Simpan Pinjam kelompok Perempuan sangat berperan dalam memberdayakan ekonomi masyarakat di Kluet Utara guna mengurangi tingkat kemiskinan, hal tersebut terlihat berdasarkan hasil persentase dari kuesioner yang dibagikan kepada nasabah. Jumlah persentase 97,7% merupakan jumlah responden yang menjawab setuju/ya bahwa SPP UPK Kluet Utara sangat berperan. Hal ini juga didukung oleh peningkatan pendapatan para responden yang sebelumnya berada dikisaran 1-2 juta/bulan menjadi di atas 5 juta/bulan.

Kata Kunci: Pemberdayaan Ekonomi, SPP, Tingkat Kemiskinan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL.....	iv
FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	x
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II LANDASAN TEORI.....	13
2.1 Pemberdayaan Masyarakat	13
2.1.1 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	16
2.1.2 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan.....	17
2.1.3 Unit Pengelola Kegiatan(UPK) PNPM Mandiri	22
2.2 Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP).....	30
2.3 Penelitian Terkait	31
2.4 Kerangka Berpikir	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
3.1 Jenis Penelitian	36

3.2 Sumber Data	37
3.3 Populasi dan Sampel	38
3.4 Teknik Pengumpulan Data	39
3.5 Teknik Analisis Data	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 43

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
4.1.1 Kependudukan Kecamatan Kluet Utara.....	43
4.1.2 Sejarah UPK Kluet Utara	45
4.2 Persyaratan	48
4.3 Karakter Responden.....	49
4.3.1 Keadaan Responden Berdasarkan Usia.....	49
4.3.2 Keadaan Responden Berdasarkan Pendidikan.....	50
4.3.3 Keadaan Responden Berdasarkan Status	52
4.3.4 Keadaan Responden Berdasarkan Tanggungan.....	53
4.3.5 Keadaan Responden Berdasarkan Alamat	54
4.4 Pembahasan	55
4.4.1 Pendapatan Responden Sebelum dan Sesudah Mendapatkan Bantuan UPK Kluet Utara.....	55
4.4.2 Peran SPP UPK bagi Ekonomi	56
4.4.3 Pemanfaatan Dana SPP UPK Kluet Utara	57
4.4.4 UPK Memberdayakan Masyarakat Mengurangi Kemiskinan	59
4.4.5 Jumlah Peningkatan Pendapatan	60
4.4.6 Pelayanan Petugas SPP UPK terhadap Responden.....	61
4.4.7 Kendala Responden terhadap Pihak SPP UPK Kluet Utara	62
4.4.8 Tindakan Pihak SPP UPK terhadap Responden	63
4.4.9 Hubungan Pihak SPP UPK Kluet Utara dengan Anggota Nasabah.....	64
4.5 Kendala Pihak SPP UPK di Kluet Utara	65

BAB V PENUTUP	72
5.1 Kesimpulan	69
5.2 Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Garis Kemiskinan Provinsi Aceh Tahun 2017-2019	2
Tabel 1.2	Jumlah Dana yang di Pinjam Masyarakat SPP di Kluet Utara Aceh Selatan Tahun 2016-2020	6
Tabel 1.3	Persentase Penduduk Miskin (Persen).....	8
Tabel 2.1	Penelitian Terkait.....	32
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Menurut Gampong dan Jenis Kelamin dalam Kecamatan Kluet Utara Tahun 2019	44
Tabel 4.2	Partisipasi UPK Syariah Kluet Utara dengan BLM.....	46
Tabel 4.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	49
Tabel 4.4	Tingkat Usia Responden Peserta SPP UPK PNPM Mandiri Perdesaan di Wilayah Kecamatan Kluet Utara Aceh Selatan	50
Tabel 4.5	Tingkat Pendidikan Responden Peserta SPP UPK PNPM Mandiri Perdesaan di Wilayah Kecamatan Kluet Utara Aceh Selatan	51
Tabel 4.6	Keadaan Responden Berdasarkan Status.....	52
Tabel 4.7	Jumlah Tanggungan Responden yang Mengambil Dana SPP UPK PNPM Mandiri Perdesaan di Kluet Utara Aceh Selatan	53
Tabel 4.8	Alamat Responden.....	54
Tabel 4.9	Pendapatan Responden Sebelum dan sesudah Mendapatkan Bantuan SPP UPK PNPM Mandiri...	55
Tabel 4.10	Peran SPP UPK Kluet Utara bagi Ekonomi	56
Tabel 4.11	Keadaan Responden Berdasarkan Manfaat	58
Tabel 4.12	UPK Kluet Utara Memberdayakan Masyarakat Mengurangi Kemiskinan	60
Tabel 4.13	Jumlah Peningkatan Pendapatan.....	61
Tabel 4.14	Pelayanan Petugas SPP UPK terhadap Responden .	62
Tabel 4.15	Kendala Responden Terhadap UPK Kluet Utara	62
Tabel 4.16	Tindakan Pihak SPP UPK Terhadap Responden....	63
Tabel 4.17	Hubungan Pihak SPP UPK PNPM Mandiri dengan Anggota Nasabah	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Tahapan Pemberdayaan	21
Gambar 2.2 Struktur Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM).....	26
Gambar 2.3 Struktur Minimal UPK	27
Gambar 2.4 Skema Kerangka Berfikir	34



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian	77
Lampiran 2 Jumlah Data yang Mengambil Dana Simpanan Pinjam Se-Kluet Utara	82
Lampiran 3 Foto Penelitian	83
Lampiran 4 Hasil Kuesioner dari Responden	86
Lampiran 5 Data Badan Pusat Statistik	95
Lampiran 6 Data Dana Bergulir UPK Syariah Kluet Utara	87
Lampiran 7 Daftar Riwayat Hidup	98



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang menghadapi berbagai masalah kependudukan, salah satunya yaitu perekonomian, dan seperti yang kita ketahui fenomena kemiskinan di Indonesia masih sulit dipecahkan. Kemiskinan di Indonesia menyebabkan berbagai masalah-masalah, seperti kebodohan, kelaparan, kesenjangan sosial, masalah kesehatan, dan tindakan kriminalitas yang semakin hari semakin meningkat. Problem kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh kondisi ekonomi yang kekurangan pendapatan yang tidak mencukupi, tetapi sebab-sebab lain seperti tingkat kualitas sumber daya manusia yang bersangkutan, masalah sedikit dan sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan, serta pengangguran yang terus bertambah. Oleh karenanya kemiskinan sebagai suatu potret permasalahan global merupakan problem yang harus segera di tuntaskan, baik oleh pemerintah sebagai pemegang kebijakan dalam pengentasan kemiskinan. (Yani,2018).

Pembangunan nasional bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka kawasan perdesaan mendapat prioritas sebagai bidang garapan pembangunan. Kawasan perdesaan pada saat ini dapat diidentikkan dengan kata kemiskinan, terutama di

Aceh. Kemiskinan bisa di ukur dengan melihat garis kemiskinan, garis kemiskinan merupakan tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standard hidup yang mencukupi di suatu Negara (BPRS, 2020). Garis kemiskinan berguna sebagai perangkat ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur rakyat miskin dan mempertingkan pembaharuan sosio-ekonomi, misalnya seperti peningkatan kesejahteraan dan asuransi pengangguran untuk menanggulangi kemiskinan. Berikut tabel data kemiskinan Aceh dari tahun 2015-2019:

Tabel 1.1
Data Garis Kemiskinan Provinsi Aceh, Tahun 2017-2019

Tahun	Jumlah Garis Kemiskinan (Ribu)	Jumlah Penduduk Miskin (%)
2015	390 150,00	17,80%
2016	410 956,00	16,75%
2017	435 454,00	16,89%
2018	464 626,00	15,97%
2019	486 935,00	15,32%

Sumber: BPS Aceh, 2019

Berdasarkan Tabel di atas dapat kita lihat bahwa garis kemiskinan tertinggi yaitu pada tahun 2019 dengan nominal angka 486 935,00. Semakin tinggi garis kemiskinan maka semakin rendah jumlah penduduk yang miskin. Berdasarkan BPS (2019) Aceh Selatan menempati urutan ke-20 dengan tingkat kemiskinan 14,07%. Pada kenyataannya, banyak masyarakat yang tinggal di pedesaan memang sangat akrab dengan kemiskinan. Pada

umumnya mereka hidup dalam keterbatasan, kemiskinan serta ketidakberdayaan dalam menghadapi berbagai perkembangan dan perubahan yang terjadi. Ketidakberdayaan masyarakat pedesaan termasuk masyarakat miskin, disamping disebabkan oleh masalah ekonomi, juga kurangnya akses masyarakat untuk memperoleh peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat, termasuk informasi. (Kusumaningrat, 2019).

Oleh karena itu perlu adanya pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses memperkuat masyarakat yang mengalami masalah kemiskinan dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau pengetahuan, dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara ekonomi maupun sosial (Suharto, 2019). Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah upaya untuk mengubah suatu keadaan atau kondisi masyarakat baik secara individu maupun berkelompok dalam memecahkan berbagai persoalan terkait peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan. Bagian dari sektor pemberdayaan yang mutlak harus diadakan atau ditingkatkan adalah pembangunan disektor perekonomian yang akan berpengaruh besar terhadap kemajuan negara dan masyarakat Indonesia karena diarahkan pada terwujudnya perekonomian nasional yang mandiri dan handal berdasarkan demokrasi ekonomi.

Salah satu program pembangunan perekonomian adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.

PNPM Mandiri Perdesaan merupakan bagian dari PNPM Mandiri yang memiliki pemberdayaan masyarakat dalam lingkup perdesaan, PNPM Mandiri adalah program yang dikembangkan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang diluncurkan pada tahun 1998. Tujuan dibentuknya PNPM Mandiri Perdesaan adalah mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan peran pemerintah desa yang ada di seluruh Indonesia melalui penyediaan sumber daya investasi dalam mendukung proposal produktif yang dikembangkan oleh masyarakat, menggunakan proses perencanaan partisipatif (Bappenas, 2013).

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mempunyai batasan waktu pelaksanaan dan kini program PNPM Mandiri telah berakhir ditandai dengan diberlakukannya UU No. 6 tahun 2014. Aset PNPM Mandiri yang berupa aset fisik berupa bangunan dan perlengkapan kerja maupun aset ekonomi berupa dana perguliran harus tetap lestari dan berkelanjutan. Oleh karena itu PNPM membentuk lembaga keuangan berupa Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri untuk mengelola aset yang masih ada (Pratama, 2018). Salah satu upaya pembangunan ekonomi guna memberdayakan masyarakat melalui program UPK PNPM Mandiri adalah kegiatan Simpan Pinjam kelompok Perempuan (SPP) guna mengurangi tingkat kemiskinan. Simpan Pinjam kelompok Perempuan (SPP) merupakan salah satu program dari UPK PNPM Mandiri Perdesaan. Sebagai alternatif pemecahan permasalahan kemiskinan di perdesaan. Program Simpan Pinjam

kelompok Perempuan memberikan permodalan bagi kelompok perempuan yang menjalankan kegiatan simpan pinjam dengan tingkat suku bunga yang lebih rendah dari pada bank, hal tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat terutama kaum perempuan untuk dapat meningkatkan taraf hidup dengan mengembangkan usaha yang dikelola.

Pada umumnya, kegiatan SPP ini adalah untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam perdesaan, kemudian akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuanserta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan menciptakan lapangan kerja. Secara khusus, kegiatan SPP adalah dilakukan oleh kaum perempuan dengan aktivitas pengelolaan dana simpanan dan pengelolaan dana pinjaman (Hasanah, 2013).

Simpan Pinjam kelompok Perempuan (SPP) di Kluet Utara merupakan salah satu SPP yang memiliki tujuan dalam memberdayakan wanita di daerah Perdesaan. Ada satu hal yang dapat diapresiasi dari SPP Kluet Utara adalah berupa tertib administrasi dan kekompakan pengurus SPP dan seluruh kelembagaan yang terlibat dalam mendukung optimalisasi kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan. Program SPP di Kluet Utara berjalan dengan baik, karena setiap tahun selalu bertambah total nasabah yang mengambil dana Simpan

Pinjam tersebut. Hal ini bisa dilihat dari tabel data statistik dari tahun 2016-2020.

Tabel 1.2
Jumlah Dana yang dipinjam oleh Masyarakat Simpan Pinjam
Kelompok Perempuan (SPP) di Kluet Utara, Aceh Selatan
Tahun 2016-2020.

No	Tahun	Jumlah Nasabah	Jumlah Dana
1.	2016	84	1.260.000.000
2.	2017	146	2.190.000.000
3.	2018	127	1.905.000.000
4.	2019	110	1.650.000.000
5.	2020	26	390.000.000
Total		493	7.395.000.000

Sumber: UPK Kota Fajar (2019).

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa pada tahun 2016 jumlah nasabah yang menggunakan dana simpan pinjam berjumlah 84 orang dan dana yang digunakan mencapai 1.260.000.000. Pada tahun 2017 pengguna dana simpan pinjam meningkat hingga 146 orang dengan dana 2.190.000.000. Pada tahun 2018 pengguna simpan pinjam mencapai 127 orang dengan dana 1.905.000.000. Pada tahun 2019 yaitu mencapai 110 orang dengan dana 1.650.000.000. Pada tahun 2020 pengguna simpan pinjam menurun drastis dengan jumlah 26 orang dengan dana 390.000.000, penurunan ini dikarenakan akibat Pandemi Covid-19. Hal tersebut menunjukkan bahwa dana Simpan Pinjam Unit Pengelolaan Kegiatan di Kluet Utara tertinggi pada tahun 2017.

Aneka usaha yang didanai atau diberikan pinjaman usaha yaitu kepada penjahit, kerajinan dan pembuatan kue yang menjadi jenis usaha terbesar oleh penerima manfaat SPP tersebut. Adapun alasan peneliti mengambil penelitian ini adalah karena banyaknya masyarakat yang mengambil dana simpan pinjam namun tidak mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat terutama masyarakat menengah ke bawah. Hal ini diketahui dari hasil observasi awal yang peneliti lakukan dengan pihak UPK pada hari Selasa tanggal 3 November 2020. Alasan lain peneliti mengambil penelitian ini dikarenakan jumlah nasabah yang mengambil dana simpan pinjam di Daerah Kluet Raya yang mencakup lima Kecamatan, yaitu Kluet Utara dengan 110 jumlah nasabah, Kluet Tengah 62 jumlah nasabah, Kluet Timur dengan 47 jumlah nasabah, Kluet Selatan 89 jumlah nasabah dan Pasie Raja dengan 92 jumlah nasabah. Kluet Utara merupakan penduduk terbanyak yang mengambil dana simpan pinjam tersebut. Alasan ketiga peneliti mengambil penelitian ini dikarenakan dari 5 Kecamatan di Kluet Raya, pada tanggal 18 Juni 2013 UPK Kluet Utara mendapat penghargaan langsung dari Menteri Dalam Negeri oleh Bapak Gamawan Fauzi. Meskipun sudah mendapat penghargaan pada tahun 2013, namun tidak mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat Kluet Utara. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.3

Tabel 1.3
Persentase Penduduk Miskin (Persen)

Kecamatan	Persentase Penduduk Miskin (Persen).				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kluet Utara	13,24%	13,48%	14,07 %	14,01%	13,09%

Sumber: BPS (2019)

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa meskipun urutan dari 2015 hingga 2019 angka persentasenya meningkat lalu menurun lagi pada tahun 2019, tetapi angka kemiskinan Kluet Utara masih relatif tinggi. Alasan empiris peneliti melakukan penelitian di Kluet Utara dikarenakan, jarak tempuh peneliti ke tempat penelitian lebih dekat atau bisa dikatakan hemat biaya dan hemat waktu. Alasan peneliti kedua tentang Penghargaan seputaran Kompak Award 2013, dengan melihat keadaan di Kluet Utara peneliti ingin mengetahui apa penyebab Kluet Utara unggul dalam hal tersebut. Alasan ketiga lebih mudah untuk mendapatkan data dana simpan pinjam dari lembaga UPK Kecamatan.

Alasan peneliti tidak mengambil penelitian di Provinsi, dikarenakan peneliti akan kesulitan dalam mendapatkan data tentang seputaran SPP UPK. Alasan kedua yaitu dikarenakan di Provinsi Aceh sudah banyak yang melakukan penelitian, hal ini terlihat sudah banyak jurnal-jurnal penelitian UPK di Aceh ditemukan. Alasan peneliti tidak mengambil penelitian di Provinsi, dikarenakan cakupan Provinsi lebih luas dari pada Kecamatan. Alasan Keempat peneliti tidak mengambil penelitian di Provinsi

Aceh, dikarenakan selain Kluet Raya, banyak lembaga-lembaga penyedia simpan pinjam lainnya.

Dari penelitian sebelumnya belum ada yang meneliti SPP untuk meningkatkan pemberdayaan wanita di Aceh Selatan. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Di Kluet Utara, Aceh Selatan)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang didapat adalah

1. Bagaimana peran Simpan Pinjam kelompok Perempuan dalam memberdayakan ekonomi masyarakat di Kluet Utara guna mengurangi tingkat kemiskinan?
2. Apa saja yang menjadi kendala pada program Simpan Pinjam kelompok Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka di dapatkan tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui peran Simpan Pinjam kelompok Perempuan dalam memberdayakan ekonomi masyarakat di Kluet Utara guna mengurangi tingkat kemiskinan.
2. Untuk mengetahui kendala pada program Simpan Pinjam kelompok Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, penelitian ini menambah pengetahuan dibidang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Simpan Pinjam kelompok Perempuan PNPM Mandiri khususnya Unit Pengelola Kegiatan (UPK).
2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi masyarakat maupun kalangan mahasiswa dalam memahami bahwa peran PNPM Mandiri UPK dalam pemberdayaan masyarakat sangat penting dan besar pengaruhnya bagi mereka yang tergolong ekonomi lemah.

1.5 Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan, penulis membagi penelitian ini menjadi beberapa bab dan beberapa babnya terdiri dari sub bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini merupakan studi teoritis yang terdiri dari bab-bab dan sub-bab yang memaparkan tentang gambaran umum peranan PNPM Mandiri UPK dan teori pemberdayaan ekonomi masyarakat.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang penjelasan rencana dan prosedur penelitian yang dilakukan penulis seperti penjelasan tentang rancangan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, subyek dan obyek penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai deskripsi objek penelitian. Hasil temuan penelitian adalah jawaban atas seluruh pertanyaan penelitian yang telah disebutkan dalam bagian rumusan permasalahan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini disampaikan kesimpulan hasil penelitian dan saran yang dapat diambil dari penelitian yang telah dilakukan.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pemberdayaan Masyarakat

Ekonomi masyarakat adalah segala kegiatan ekonomi dan upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pemberdayaan ekonomi merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan kemampuan atau potensi baik yang tersedia dalam masyarakat itu sendiri maupun hasil dari modifikasi eksternal sehingga memenuhi kebutuhan kebutuhan sehari-hari (Saragi, 2014).

Kata pemberdayaan mengandung arti tangguh atau kuat. Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata daya yang berarti kekuatan atau kemampuan (Muljono, 2012). Dalam kamus besar bahasa Indonesia pemberdayaan adalah upaya membuat suatu kemampuan atau berkekuatan, dengan demikian pemberdayaan ekonomi anggota merupakan upaya untuk mendirikan anggota agar memiliki kemampuan dan kekuatan dalam bidang ekonomi. Pemberdayaan dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, memperoleh daya dan pemberian daya. Pengertian proses merujuk pada serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan secara kronologis sistematis yang mencerminkan tahapan upaya mengubah masyarakat yang kurang atau belum berdaya menuju keberdayaan. Sedangkan ekonomi adalah aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran dan

konsumsi barang dan jasa (Depdiknas, 2010). Adapun ekonomi masyarakat adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi masyarakat. Dimana ekonomi masyarakat sendiri adalah sebagian kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan masyarakat kebanyakan yang dengan cara swadaya mengelola sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan, yang selanjutnya disebut sebagai usaha.

Dalam pengertian lain, pemberdayaan atau pengembangan atau tepatnya pengembangan sumber daya manusia adalah upaya memperluas *horizon* pilihan bagi masyarakat. Ini berarti masyarakat diberdayakan untuk melihat dan memilih dan mempunyai kesempatan untuk mengadakan pilihan-pilihan. Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh suatu masyarakat sehingga mereka dapat mengaktualisasikan jati dirinya, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan demikian pemberdayaan adalah suatu cara untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian baik dibidang ekonomi, sosial, budaya dan politik.

Salah satu indikator telah berdayanya perekonomian masyarakat adalah terlaksananya kegiatan ekonomi tersebut dengan baik, yaitu meningkatnya produksi serta terpenuhinya konsumsi

dari anggota/masyarakat tersebut. Pemberdayaan berguna untuk meningkatkan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah paling tidak harus ada perbaikan akses terhadap empat hal, yaitu akses terhadap sumber daya, teknologi, pasar dan terhadap permintaan. Konsep pemberdayaan lahir sebagai antitesis terhadap model pembangunan dan model industrialisasi yang kurang memihak pada rakyat mayoritas. Konsep ini dibangun menurut kerangka dari kerangka logik (Hikmat, 2010) sebagai berikut:

- a. Bahwa proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan penguasaan faktor produksi.
- b. Pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat yang pengusaha pinggiran.
- c. Kekuasaan akan membangun sistem pengetahuan politik, hukum dan ideologi yang manipulatif untuk memperkuat dan legitimasi.

Dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat, pola pemberdayaan yang tepat sasaran sangat diperlukan, bentuk yang tepat adalah dengan memberikan kesempatan kepada kelompok miskin untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang telah mereka tentukan.

2.1.1 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan ekonomi masyarakat ialah usaha memberi pengetahuan, keterampilan serta menumbuhkan kepercayaan diri serta kemauan kuat dalam diri seseorang sehingga mampu membangun suatu kehidupan sosial-ekonomi yang lebih baik dengan kekuatan sendiri. Singkatnya, pemberdayaan sosial ekonomi bermaksud menciptakan manusia swadaya dalam kegiatan sosial ekonomi. Pemberdayaan ekonomi masyarakat ini pada intinya dapat diupayakan melalui berbagai kegiatan antara lain: pelatihan, pendampingan, penyuluhan, pendidikan dan keterlibatan berorganisasi demi menumbuhkan dan memperkuat motivasi hidup dan usaha, serta pengembangan pengetahuan dan keterampilan hidup dan kerja (Yayasan SPES, 2011).

Terdapat beberapa konsep pemberdayaan ekonomi menurut Sumodiningrat (2011) secara ringkas dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Perekonomian rakyat adalah perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat. Perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat adalah perekonomian nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas untuk menjalankan roda perekonomian mereka sendiri.
- b. Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, moder dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Karena

kendala pengembangan ekonomi rakyat adalah kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan struktural. Perubahan struktural yang dimaksud adalah perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi kuat, dari ekonomi subsistem ke ekonomi pasar, dari ketergantungan ke kemandirian. Langkah-langkah proses perubahan struktural meliputi: 1) pengalokasian sumber pemberdayaan sumber daya; 2) penguatan kelembagaan; 3) penguasaan teknologi; 4) pemberdayaan sumberdaya manusia.

Dari berbagai pandangan mengenai konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat, maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan kepemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, penguatan penguasaan untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan keterampilan yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri maupun aspek kebijakannya.

2.1.2 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan

Secara umum kemiskinan dapat diartikan sebagai keadaan dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok lainnya.

Menurut Suryawati (2013) mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Standar kehidupan ini secara tidak langsung tampak pengaruhnya dalam bidang kesehatan, kehidupan moral, dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin. Penyebab kemiskinan menurut Kuncoro (2013) adalah sebagai berikut:

1. Secara makro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan timpang, penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah yang terbatas dan kualitasnya rendah.
2. Kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia karena kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitas juga rendah upahnya pun rendah.
3. Kemiskinan muncul sebab perbedaan akses dan modal.

Teori-teori kemiskinan pada umumnya bermuara pada dua paradigma besar yang juga berpengaruh pada pemahaman mengenai kemiskinan dan penanggulangan kemiskinan. Dua paradigma yang dimaksud adalah neo-liberal dan demokrasi-sosial. Dua paradigma ini memiliki perbedaan yang sangat jelas terutama dalam melihat kemiskinan. Paradigma yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Paradigma Neo-Liberal

Neoliberalisme merupakan nomenklatur yang diciptakan dari luar (Caniago, 2020). Pendekatan ini menempatkan kebebasan individu sebagai komponen penting dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu dalam melihat kemiskinan, pendekatan ini memberikan penjelasan bahwa kemiskinan merupakan persoalan individu yang merupakan akibat dari pilihan-pilihan individu. Bagi pendekatan ini kekuatan pasar merupakan kunci utama untuk menyelesaikan masalah kemiskinan. Hal ini dikarenakan kekuatan pasar yang diperluas dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menghapuskan kemiskinan. Bagi pendekatan ini strategi penanggulangan kemiskinan bersifat sementara dan peran negara sangat minimum.

Kelemahan paradigma ini adalah minimnya kontrol pemerintah sehingga regulasi kurang. Pihak yang lemah akan tertindas yang kuat akan merajalela dan sebagai objek mencari keuntungan yang sebesar-besarnya (Caniago, 2020). Hal ini mengakibatkan masyarakat menjadi konsumtif, bentuk-bentuk kemiskinan yang muncul dalam masyarakat kurang mendapatkan perhatian. Bentuk-bentuk kemiskinan yang tidak dapat ditangkap oleh paradigma ini terutama bentuk kemiskinan yang disebabkan oleh dimensi sosial dalam masyarakat atau kelompok masyarakat. Akibatnya akar permasalahan yang menjadikan penyebab kemiskinan juga tidak dapat ditemukan. Namun memang pendekatan *income proverty* atau pendapatan kemiskinan ini lebih

mudah dilihat dan dikaji karena langsung dapat terukur, serta sasaran pada perbaikan ditingkat individu langsung dirasakan oleh masyarakat miskin.

2. Paradigma Demokrasi-sosial

Paradigma ini tidak melihat kemiskinan sebagai persoalan individu, melainkan lebih melihatnya sebagai persoalan. Ketidakadilan dan ketimpangan dalam masyarakatlah yang mengakibatkan kemiskinan ada dalam masyarakat. Bagi pendekatan ini tertutupnya akses-akses bagi kelompok tertentu menjadi penyebab terjadinya kemiskinan. Pendekatan ini terus menerus berada dalam proses perubahan dan modernisasi sepanjang masa namun berdasarkan atas seperangkat nilai dan hak dasar, preferensi institusional dan panduan pembuatan kebijakan yang ditetapkan dengan baik (Meyer, 2012). Kelemahan teori ini adalah adanya ketergantungan yang tinggi pada negara dalam membentuk struktur dan institusi untuk menanggulangi kemiskinan. Padahal pencapaian pembentukan struktur dan institusi yang tepat dalam menangani kemiskinan relatif dalam pendekatan ini juga lebih menyulitkan dalam membentuk kebutuhan standar yang diperlukan oleh kelompok miskin. Hal ini dikarenakan kemiskinan tidak dilihat dari kebutuhan hidupnya. Namun demikian pendekatan ini membuka dimensi lain dari penyebab kemiskinan yaitu pada struktur dan institusi, yang telah menyebabkan tertutupnya akses bagi kelompok tertentu dalam masyarakat. Sehingga melalui pendekatan ini dapat dilihat bahwa akar permasalahan kemiskinan

bukan hanya sekedar pada kemampuan individu tetapi bagaimana struktur dan institusi dalam masyarakat memberikan jaminan bagi semua kelompok untuk mendapatkan kesetaraan dalam mencapai kemandirian dan kebebasan. Oleh sebab itu kemiskinan perlu dibebaskan melalui pemberdayaan.

Pemberdayaan merupakan suatu proses yang dijalankan dengan kesadaran dan partisipasi penuh dari pihak untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat sebagai sumber daya pembangunan sehingga mampu mengenali permasalahan yang dihadapi. Dalam proses pemberdayaan mempunyai tiga tahapan, yaitu penyadaran, pengkapasitasan dan pendayaan (Apriyanti, 2011).



Sumber: Wrihatnolo dan Dwidjowijoto dalam Apriyanti (2011)

Gambar 2.1 Tahapan Pemberdayaan

- Tahapan penyadaran merupakan target sasaran yaitu masyarakat miskin diberikan pemahaman bahwa mereka mempunyai hak untuk menjadi berada. Disamping itu, masyarakat miskin juga diberikan kemampuan untuk keluar dari kemiskinannya. Pada tahap ini masyarakat diberikan

penyadaran bahwa proses pemberdayaan itu berasal dari diri mereka sendiri.

- Tahapan pengkapasitasan bertujuan untuk memampukan masyarakat miskin sehingga mereka memiliki keterampilan untuk mengelola peluang yang diberikan. Pada tahapan ini dilakukan pendampingan dengan memberikan pelatihan-pelatihan dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan keahlian dari masyarakat miskin tersebut.
- Pada tahapan pendayaan, masyarakat miskin diberikan peluang yang disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki melalui partisipasi aktif dan berkelanjutan dengan memberikan peran yang besar secara bertahap sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya, diakomodasi partisipasinya serta dituntun untuk melakukan evaluasi diri terhadap pilihan dan hasil pelaksanaan ata pilihan mereka.

2.1.3 Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) adalah unit yang mengelola operasional kegiatan masyarakat pedesaan di kecamatan dan membantu Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dalam Mengkoordinasikan pertemuan-pertemuan di kecamatan. Pengurus UPK berasal dari anggota masyarakat yang diajukan dan dipilih berdasarkan hasil musyawarah desa. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) bertanggung jawab sebagai agen pemerintah dalam melakukan peningkatan ekonomi masyarakat, penanggulangan

kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di pedesaan (Sholikin, 2017)

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Perdesaan merupakan lembaga yang mengelola dana PNPM Mandiri perdesaan baik dana hibah Bantuan Langsung Masyarakat (LBM) maupun dana pinjaman bergulir (Pelaksana Tugas Operasional (PTO) PNPM MP, 2010).Pengurus UPK adalah masyarakat yang telah dipilih dan terlibat secara langsung bertanggung jawab dalam pelaksanaan operasional sehari-hari. Struktur organisasi dan kebutuhan jumlah pengurus dapat disesuaikan dengan kebutuhan cakupan wilayah tugas dan kebutuhan beban tugas (Petunjuk Teknis Keorganisasian dan Pengawas UPK, 2016).

Tugas dan tanggung jawab UPK adalah (Petunjuk Teknik Keorganisasian dan Pengawas UPK, 2016) sebagai berikut:

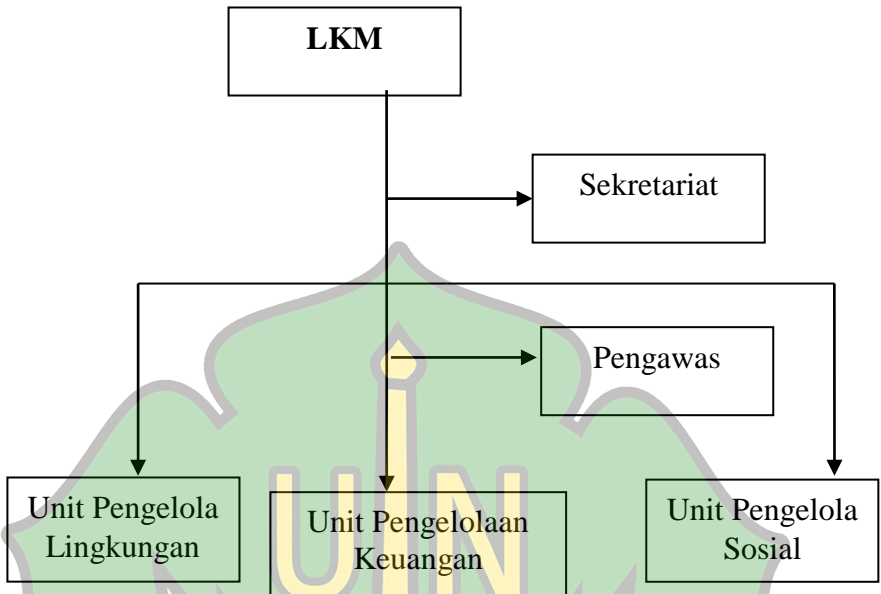
- a. Bertanggungjawab terhadap seluruh pengelolaan di tingkat kecamatan.
- b. Bertanggungjawab mengelola administrasi dan pelaporan seluruh transaksi.
- c. Bertanggungjawab mengelola dokumen PNPM Mandiri perdesaan yang bersifat keuangan dan non keuangan.
- d. Bertanggungjawab mengelola dana bergulir.
- e. Membina kelompok peminjaman.
- f. Mensosialisasikan dan menegakkan prinsip-prinsip PNPM.

- g. Melakukan administrasi dan pelaporan setiap transaksi keuangan dan non keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan program.
- h. Mengevaluasi dan memeriksa langsung Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD) yang dibuat oleh desa dalam setiap tahapan proses PNPM Mandiri Perdesaan sesuai dengan ketentuan.
- i. Melakukan penguatan kelompok peminjaman dalam kelembagaan pengelolaan keuangan, pengelolaan peminjaman.
- j. Membantu pengembangan kapasitas pelaku program melalui pelatihan bimbingan lapangan dan pendampingan dalam setiap kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.
- k. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan.

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dapat juga dilakukan sendiri, namun seringkali harus diusahakan bersama-sama. Dalam memenuhi kebutuhan secara bersama-sama tersebut akhirnya mendorong manusia untuk hidup berkelompok atau bermasyarakat. Kelompok masyarakat yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan bersama atau untuk mencapai tujuan yang sama inilah yang disebut dengan organisasi. Dalam perkembangannya organisasi dapat dibedakan ke dalam organisasi profit dan non profit. Organisasi profit adalah organisasi yang

bertujuan untuk memperoleh laba dari kegiatan yang dilakukannya. Organisasi non profit adalah organisasi yang tidak bertujuan untuk mencari laba di dalam kegiatannya. Namun dalam pelaksanaannya organisasi non profit sering membentuk organisasi profit di dalamnya yang merupakan satu bagian dari organisasi non profit dengan tujuan untuk memperoleh laba yang akan digunakan menunjang pencapaian tujuan umum organisasi non profit tersebut. Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) adalah organisasi non profit, namun LKM memiliki unit pengelola, khususnya Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) yang bertujuan memperoleh laba untuk menunjang misi utama LKM yaitu menanggulangi kemiskinan dengan cara memberikan pinjaman bergulir yang dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin.

Agar organisasi ini dapat berjalan secara baik dan efektif perlu dibuat pedoman mengenai keorganisasian LKM, yang mencakup Struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab, proses penempatan dan proses pemberhentian masing-masing petugas. Selain keorganisasian, dalam pedoman teknis ini juga dijelaskan mengenai pengawasan keuangan UPK seperti: jenis pengawasan, bagaimana melaksanakan pengawasan, teknik pengawasan dan teknik pemeriksaan. Merujuk pada pedoman PNPM Mandiri Perkotaan dan fungsi manajemen di atas, struktur Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) dan Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) disusun sebagaimana struktur LKM berikut:



Sumber: Petunjuk Teknik Keorganisasian dan Pengawas UPK, PNPM Mandiri Perkotaan (2016)

Gambar 2.2
Struktur Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM)

Penjelasan:

LKM : Pemimpi kolektif 9-13 orang yang bersama masyarakat Bertugas menyusun kebijakan dalam rangka penggulangan kemiskinan.

Secretariat : Petugas yang diangkat oleh LKM yang bertugas mengelola administrasi organisasi dan keuangan LKM.

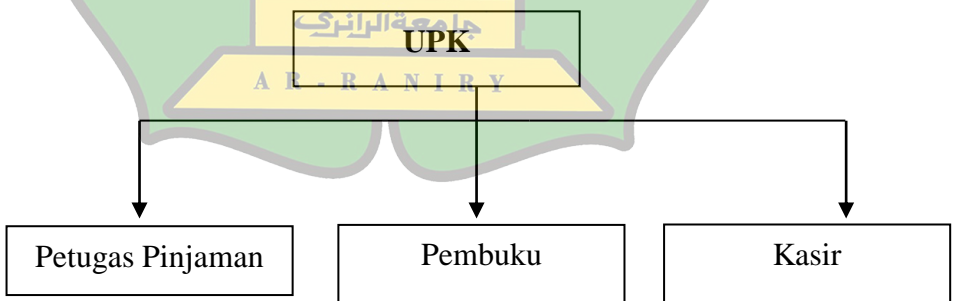
Pengawas : Anggota masyarakat yang diangkat

LKM dan memiliki kemampuan untuk bertugas mengawasi dan membina kegiatan UPK/pengelolaan pinjaman bergulir, berjumlah 2-3 orang.

Unit Pengelola Keuangan : Unit kerja terdiri dari 2-4 orang tenaga yang diangkat oleh LKM untuk melakukan tugas mengelola kegiatan pinjaman bergulir.

Unit Pengelola Lingkungan : Unit kerja yang diangkat oleh LKM untuk melakukan tugas mengelola kegiatan-kegiatan infrastruktur/lingkungan.

Unit Pengelola Sosial :Unit kerja yang diangkat oleh LKM untuk melakukan tugas Mengelola kegiatan-kegiatan sosial.



Sumber: Petunjuk Teknik Keorganisasian dan Pengawas UPK, PNPM Mandiri Perkotaan (2016)

Gambar 2.3
Struktur Minimal UPK

Penjelasan:

- Manajer UPK : Pemimpin yang bertanggung jawab kepada LKM atasseluruh kegiatan UPK
- Petugas Pinjaman : Petugas UPK yang bertanggung jawab kepada manajer UPK dalam menangani pinjaman dengan tugas mempromosikan, memeriksa, mengusulkan membina peminjam dan menagih tunggakan yang ada.
- Pembuku : Petugas UPK yang bertanggung jawab kepada manajer UPK atas kegiatan pembukuan dan laporan keuangan.
- Kasir : Petugas UPK yang bertanggung jawab kepada manajer UPK atas pengelolaan kas UPK.

Organisasi yang baik harus membuat pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antara pekerjaan atau jabatan yang berbeda agar tidak menjadi tumpang tindih pekerjaan serta memudahkan dalam penilaian kinerja dari masing-masing pekerja. Unit pengelolaan kegiatan adalah unit yang mengelola operasional kegiatan PNPM Mandiri perdesaan di Kecamatan dan membantu Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) mengordinasi pertemuan-pertemuan di Kecamatan, secara umum UPK mempunyai tugas dan tanggung jawab yang besar dalam program PNPM Mandiri,

(Petunjuk Teknis Keorganisasian dan Pengawas UPK, 2016)
diantaranya sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM Mandiri.
2. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh transaksi kegiatan PNPM.
3. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM yang bersifat keuangan.
4. Bertanggung jawab terhadap dana bergulir.
5. Melakukan pembinaan terhadap kelompok peminjaman.
6. Melakukan sosialisasi dan penegakkan prinsip-prinsip PNPM.
7. Membuat perencanaan keuangan dan rencana kerja sesuai dengan kepentingan program yang disampaikan pada Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD).
8. Melakukan pertanggung jawaban keuangan dan realisasi rencana kerja pada BKAD sesuai dengan kebutuhan. Bahan laporan pertanggung jawaban disampaikan kepada seluruh desa yang terkait langsung satu minggu sebelum pelaksanaan.
9. Melakukan evaluasi dan pemeriksaan langsung Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD).
10. Melakukan bimbingan teknis.

2.2 Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)

Simpan menurut kamus besar bahasa Indonesia sama dengan menyimpan yang berarti menaruh sesuatu di tempat yang aman agar tidak rusak, hilang dan sebagainya. Simpanan adalah sesuatu yang disimpan (uang, barang dan sebagainya) (Depdiknas, 2008). Menurut Undang-undang No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian Simpanan adalah sejumlah uang yang disimpan oleh anggota kepada koperasi simpan pinjam, dengan memperoleh jasa dari koperasi simpan pinjam sesuai perjanjian.

Pinjam yang berarti meminjam yaitu memakai barang, uang dan sebagainya milik orang lain untuk waktu yang tertentu, jika sudah sampai waktunya harus dikembalikan. Pinjaman adalah yang dipinjam atau dipinjamkan (barang, uang dan sebagainya) (Depdiknas, 2008). Sedangkan menurut UU No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian Pinjaman adalah penyediaan uang oleh operasi simpan pinjam kepada anggota sebagai peminjam berdasarkan perjanjian, yang mewajibkan peminjam untuk melunasi dalam jangka waktu tertentu dan membayar jasa.

Program Simpan Pinjam kelompok Perempuan ini merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. Tujuan umum kegiatan SPP ini adalah untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam perdesaan, kemudian akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar,

dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan menciptakan lapangan kerja. Tujuan secara khusus kegiatan SPP ini adalah mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar, memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha, mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan (Dirjenpemde, 2014).

2.3 Penelitian Terkait

Penelitian tentang Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui simpan pinjam kelompok perempuan (SPP) dalam mengurangi tingkat kemiskinan telah banyak diteliti oleh penelitian terdahulu, namun peneliti akan mencoba meneliti pada lokasi yang berbeda dengan penelitian terdahulu. Tempat penelitian peneliti adalah di Kluet Utara Aceh Selatan, dan didukung oleh variabel pembeda lainnya. Menurut Hadi (2019) penelitian merupakan usaha dalam menemukan segala sesuatu untuk mengisi kekosongan dan kekurangan yang ada, menggali lebih dalam apa yang telah ada, mengembangkan dan memperluas, dan menguji kebenaran dari apa yang sudah ada tetapi kebenarannya masih diragukan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka ada beberapa kajian terdahulu yang telah diteliti oleh beberapa orang terkait dengan penelitian ini

Tabel 2.1
Penelitian Terkait

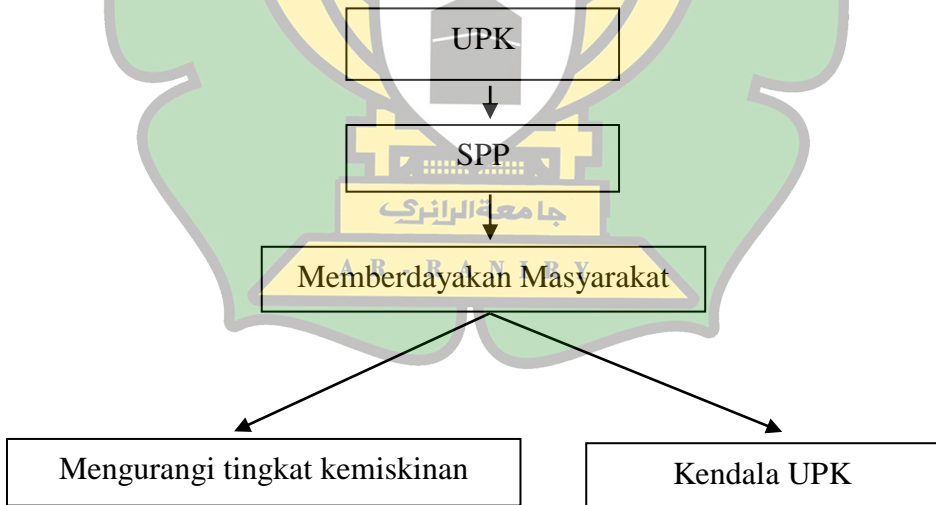
No	Nama& Judul Penelitian	Metode	Perbedaan	Persamaan
1	Jayadi (2017) AnalisisPemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Masyarakat Desa Melalui Program Unit Pengelola Kegiatan (UPK) UntukMembangun Ekonomi Lokal	Kualitatif	Variabel - Lokasi - Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) - Pambangunan Ekonomi Lokal	variabel Unit Pengelola Kegiatan (UPK).
2	Cristianto (2015) Pengaruh Keberhasilan Program nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Desa Gundi Kecamatan Godong Kabupaten Grobong	Kuantitatif <i>(eksplanatory)</i>	Variabel: - Lokasi - Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	Persamaannya yaitu pada variabel Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.
3	Nikmah (2017) Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Pada Kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan di Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati Tahun 2015	Kualitatif	Variabel: - Lokasi	Persamaannya yaitu pada variabel Simpan Pinjam kelompok Perempuan (SPP).

Tabel 2.1-Lanjutan

4	Sulaiman (2018) Analisis Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan pada Usaha Mikro dan Peranannya dalam Mengurangi Kemiskinan ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi kasus pada PNPM Mandiri Pedesaan di Gampong Pasar Kota Bakti Kec. Sakti)	Kualitatif	Variabel: - Lokasi - Usaha Mikro dan Perannya	Persamaannya yaitu pada variabel (SPP) dan variabel Mengurangi Tingkat kemiskinan
5	Yani (2018) Implementasi Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam di Desa Pematang Tengah Kecamatan Tanjung Pura	Kualitatif	Variabel: - Lokasi	Persamaannya yaitu pada variabel Simpan Pinjam kelompok Perempuan (SPP) dan Pemberdayaan Masyarakat
6	Sinaga (2018) Peranan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir	Kualitatif	Variabel: - Lokasi - Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Persamaannya yaitu pada variabel Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan variabel Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.
7	Widanarto (2016) Efektivitas Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri pedesaan di Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung	Kualitatif dan Kuantitatif	Variabel: - Lokasi	Persamaannya yaitu pada variabel Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dan variabel Simpan Pinjam kelompok Perempuan (SPP).

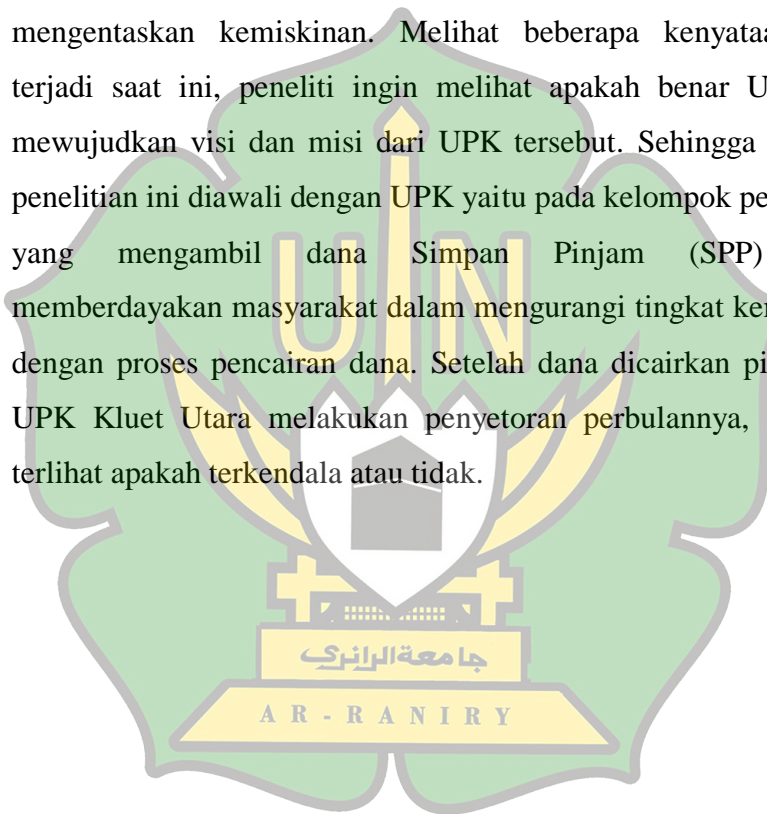
2.4 Kerangka Berpikir

Menurut Polancik (2019) kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Kerangka pemikiran dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian (*research question*) dan mempresentasikan suatu himpunan dari beberapa konsep serta hubungan diantara konsep-konsep tersebut. Pada penelitian ini kerangka berpikirnya adalah berupa alur yang dibuat oleh program PNPM Mandiri dalam menciptakan program Simpan Pinjam kelompok Perempuan (SPP) dalam memberdayakan masyarakat untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Kluet Utara. Maka, kerangka berpikir dalam penelitian ini secara sistematis dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.4
Skema Kerangka Berpikir

Penelitian ini akan menganalisis apakah UPK melalui program Simpan Pinjam kelompok Perempuan (SPP) dapat memberdayakan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan dan kendala yang dihadapi pihak UPK. Diketahui bahwa tujuan program UPK adalah untuk memberdayakan masyarakat serta mengentaskan kemiskinan. Melihat beberapa kenyataan yang terjadi saat ini, peneliti ingin melihat apakah benar UPK bisa mewujudkan visi dan misi dari UPK tersebut. Sehingga prosedur penelitian ini diawali dengan UPK yaitu pada kelompok perempuan yang mengambil dana Simpan Pinjam (SPP) untuk memberdayakan masyarakat dalam mengurangi tingkat kemiskinan dengan proses pencairan dana. Setelah dana dicairkan pihak SPP UPK Kluet Utara melakukan penyeteroran perbulannya, sehingga terlihat apakah terkendala atau tidak.



BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian dalam penyusunan karya ilmiah ini adalah metode kualitatif deskriptif, yaitu suatu metode untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang terjadi pada masa sekarang berdasarkan gambaran yang dilihat dan didengar dari hasil penelitian baik di lapangan atau teori berupa data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan topik pembahasan (Nazir, 2015). Penelitian ini terdiri dari dua jenis penelitian, yaitu:

1. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian akan dilakukan di lokasi objek penelitian ini sebagai upaya memperoleh data primer. Secara procedural operasional riset, peneliti akan berada langsung pada sumber data, untuk mengumpulkan data dari berbagai responden baik dari objek penelitian maupun dari informan yang berkaitan dengan judul penelitian ini. dengan kata lain peneliti turun dan berada di lapangan atau langsung berada di lingkungan yang mengalami masalah atau yang akan diperbaiki/disempurnakan. Karena menggunakan jenis penelitian lapangan maka sudah bisa diartikan bahwa penelitian ini dilakukan di lapangan dan berorientasi pada fenomena atau gejala yang ada di lapangan.

2. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan cara mempelajari buku-buku text tentang teori pemberdayaan ekonomi, buku dibidang usaha mikro, ekonomi keuangan dan berbagai literatur lainnya yang berkaitan, serta mempelajari hasil-hasil penelitian sebelumnya dan tulisan lain guna memperoleh konsep teori serta ketentuan yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.2 Sumber Data

1. Data Primer

Dalam penelitian ini, data primer bersumber dari penelitian lapangan (*field research*), yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melalui observasi dan wawancara dengan meneliti langsung ke lapangan. Pada penelitian ini, data primer diperoleh dari responden yaitu ibu-ibu yang menjadi anggota simpan pinjam perempuan serta pihak-pihak bersangkutan dengan penelitian ini secara langsung melalui wawancara untuk menunjang keakuratan data.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dengan penelitian studi pustaka (*library research*) yaitu dengan menggunakan buku bacaan sebagai landasan untuk mengambil data yang ada aitannya dengan penulisan karya ilmiah ini, dimana penulis dapatan dengan cara

membaca dan mengkaji buku-buku dan artikel yang ada di perpustakaan, serta data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung oleh peneliti dari subjek penelitiannya, berwujud dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh jumlah nasabah yang mengambil dana simpan pinjam dan pihak UPK yang berjumlah 495 informan. Peneliti mendeskripsikan subjek penelitian adalah masyarakat yang mengambil dana simpan pinjam UPK PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Kluet Utara, Aceh Selatan. Teknik penentuan sampling dalam penelitian ini menggunakan teknik *random sampling*. *Random sampling* adalah teknik pengambilan sampel dimana semua individu dalam populasi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama diberi kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai anggota sampel. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan angket sebagai alat untuk memperoleh data sampel.

Sedangkan mengenai penentuan jumlah sampling berdasarkan pendapat Arikunto (2016) dimana apabila jumlah responden kurang dari 100, maka sampel diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Sedangkan apabila jumlah responden lebih dari 100 maka pengambilan sampel 10%-15% atau 20%-25% atau lebih. Adapun jumlah sampel dalam penelitian ini adalah berjumlah 123 orang atau 25% jumlah

nasabah dari 493 total nasabah dan ditambah 2 sampel merupakan pihak yang akan diwawancarai, oleh karena itu jumlah total sampel dalam penelitian ini adalah 125 orang. Alasan peneliti mengambil sampel 25% dikarenakan agar sampel dapat dipantau dan mudah untuk menentukan kevalidan data, lebih mudah dalam penyebaran angket, lebih mempersingkat waktu, tenaga dan dana.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Kuesioner/Angket

Kuesioner/angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Adapun pada penelitian ini peneliti menggunakan angket untuk dijawab oleh anggota. Dikarenakan masih proses Pandemi Covid-19, peneliti menggunakan google form dalam proses penyebaran angket guna mematuhi protokol kesehatan.

2. Observasi

Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari si peneliti baik secara langsung ataupun tidaklangsung terhadap objek penelitiannya. Instrumen yang dipakai dapat berupa lembar pengamatan, panduan pengamatan dan lainnya.

3. Wawancara

Adapun pihak yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah ketua UPK dan Bendahara UPK Kecamatan Kluet Utara.

Teknik wawancara yang akan dilakukan adalah dengan cara tatap muka atau *face to face interviews* dengan tujuan untuk menggali seluruh informasi terkait UPK di Kluet Utara.

4. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data berupa sumber data tertulis, yang berbentuk tulisan yang diarsipkan atau dikumpulkan. Sumber data tertulis dapat dibedakan menjadi dokumen resmi, buku, majalah, arsip ataupun dokumen pribadi dan juga foto (Arikunto, 2016).

3.5 Teknik Analisis Data

Setelah semua data penelitian didapatkan, maka kemudian diolah menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada, dengan didukung oleh data lapangan dan teori, sehingga menghasilkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian penulis menggunakan analisis deskriptif dalam memaparkan hasil penelitian ini. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain. (Sugiono, 2011). Teknik analisis data yang meliputi 3 tahap, yaitu reduksi data (penyederhanaan), *display* data (disajikan), atau verifikasi atau penarikan kesimpulan (Maleong, 2010).

1. Reduksi data

Reduksi data dilakukan dengan cara menghilangkan atau membuang bagian-bagian isi data yang tidak mendukung permasalahan yang di kaji dalam penelitian mengenai pelaksanaan program SPP terhadap dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Kluet Utara. Data yang di reduksi adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang di rasa tidak mendukung terhadap permasalahan pelaksanaan program SPP dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Kluet Utara.

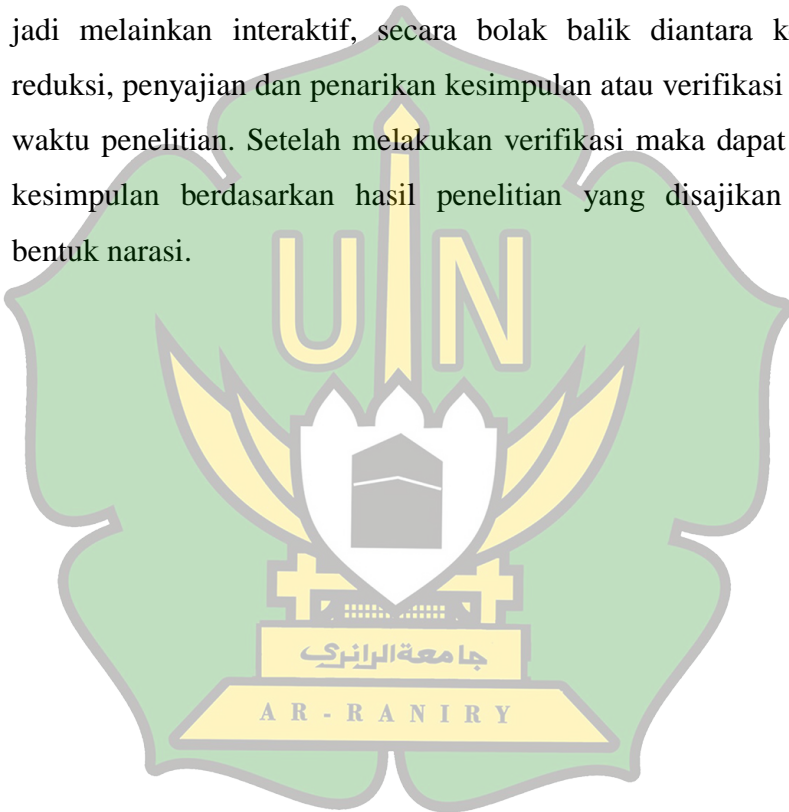
2. *Display* data

Display data merupakan suatu proses penyajian data. Dengan tujuan data yang dikumpulkan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi itu bisa di lihat gambaran seluruhnya, sehingga akan memudahkan dalam mengambil kesimpulan yang tepat dan mempermudah dalam menyusun penelitian. Data yang sudah direduksi atau dipilah-pilah selanjutnya akan disajikan dalam bentuk teks naratif dilampiri dengan gambar yang diperoleh melalui dokumentasi.

3. Verifikasi atau penarikan kesimpulan

Pada tahap ini penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna atau arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Sebelum melakukan penarikan kesimpulan terlebih

dahulu dilakukan reduksi data dan penyajian data atau display data. Penarikan kesimpulan sejak penelitian ini mulai atau dilakukan setelah data secara keseluruhan dianalisis dan ditinjau dari konsep-konsep yang berhubungan. Kesimpulan merupakan hasil penelitian. Menurut Miles dan Huberman (2013) proses analisis tidak sekali jadi melainkan interaktif, secara bolak balik diantara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan atau verifikasi selama waktu penelitian. Setelah melakukan verifikasi maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk narasi.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Kependudukan Kecamatan Kluet Utara

Kecamatan Kluet Utara memiliki 21 Desa/Kelurahan yang terdiri dari Desa Fajar Harapan, Krueng Bate, Pasie Kuala Asahan, Gunung Pulo, Pulo Ie I, Jambo Manyang, Simpang Empat, Kampung Tinggi, Ruak, Limau Purut, Pulo Kambing, Kampung Paya, Kreung Batu, Krueng luet, Alur Mas, Simpang Lhee, Suak Geringgeng, Pasie Kuala Ba'u, Kedai Padang, Kota Fajar dan Gunung Pudung. Batasan wilayah Kluet Utara sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kluet Tengah
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Pasie Kuala Ba'u
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kluet Timur
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pasie Raja

Jumlah penduduk di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan tahun 2019 berdasarkan data Kecamatan Kluet Utara dalam Angka 2019 tercatat 25.645 jiwa yang terdiri atas penduduk pria 12.753 jiwa dan penduduk wanita 12.892 jiwa (Kluet Utara dalam Angka, 2019).

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Menurut Gampong dan Jenis Kelamin
dalam Kecamatan Kluet Utara Tahun 2019

No	Desa/Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Kedai Padang	237	266	503
2	Pasie Kuala Ba'u	695	634	1329
3	Suak Geringgeng	226	237	463
4	Simpang Lhee	369	449	818
5	Simpang Empat	837	824	1661
6	Jambo Manyang	766	699	1465
7	Limau Purut	436	562	998
8	Pulo Kambing	544	548	1092
9	Kampung Paya	518	546	1064
10	Krueng Batu	1288	1316	2604
11	Gunong Pulo	363	386	749
12	Pulo Ie I	635	645	1280
13	Krueng Batee	881	887	1768
14	Pasie Kuala Asahan	411	373	784
15	Fajar Harapan	354	378	732
16	Krueng Kluet	516	573	1089
17	Alur Mas	567	566	1133
18	Kampung Tinggi	331	329	660
19	Kampung Ruak	488	527	1015
20	Kota Fajar	1839	1729	3563
21	Gunung Pudung	452	418	869
Jumlah		12753	12892	25639

Sumber: Kluet Utara dalam Angka, 2019.

Berdasarkan tabel di atas, jumlah penduduk terbanyak yaitu di Desa Kota Fajar mencapai 3563 jiwa. Karena di Desa Kota Fajar merupakan sumber atau pusat perbelanjaan terbesar di daerah Kluet.

4.1.2 Sejarah UPK Kluet Utara

UPK Kluet Utara lahir pada 25 Maret 2006 dalam Musyawarah Antar Desa (MAD) II tahun 2006. Perwakilan desa melakukan pemilihan pengurus UPK. Dalam perjalanan awal berdirinya UPK Kluet Utara berhasil melatarbelakangi lahirnya tiga kelompok dengan modal dasar Rp 30.000.000. Kekompakan pengurus UPK dan seluruh kelembagaan yang terlibat dalam mendukung optimalisasi kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan telah menjadi kunci suksesnya pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilakoni oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Kluet Utara, Aceh Selatan (RPJM UPK Kluet Utara, 2020).

Kluet Utara sebagai satu dari total 17 Kecamatan di Aceh Selatan memiliki penduduk 25.639 jiwa. Dengan jumlah penduduk miskin sekitar 13,09% atau setara sekitar 3.356 jiwa dari total penduduknya. Di tahun 2013 Kluet Utara mengelola dana bantuan langsung masyarakat sebesar Rp. 14.949.940.000; yang akan dipergunakan membiayai berbagai kegiatan yang telah ditetapkan. Seperti sarana prasarana bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan juga dukungan permodalan melalui Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Berpartisipasi dalam Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sejak tahun 1998 Kecamatan ini sampai saat ini telah mendapat alokasi Bantuang langsung Mandiri (BLM) PPK I (Siklus 1/2/3), PPK II (Siklus 4/5/6), dan PPK III (Siklus 7/8/9). Memasuki TA 2007 Kecamatan ini pun turut berpartisipasi dalam

PNPM Mandiri Perdesaan dengan BLM, berikut data UPK PNPM Kluet Utara dari tahun 2007 hingga tahun 2020:

Tabel 4.2
Partisipasi UPK PNPM dengan Bantuan
Langsung Mandiri (BLM)

Tahun	Total Dana Bergulir
2007	Rp. 500.000.000
2008	Rp. 3.000.000.000
2009	Rp. 800.000.000
2010	Rp. 2.750.000.000
2011	Rp. 3.000.000.000
2012	Rp. 3.000.000.000
2013	Rp. 3.660.453.900
2014	Rp. 960.700.000,-
2015	Rp. 1.115.200.000,-
2016	Rp. 1.260.000.000,-
2017	Rp. 2.190.000.000,-
2018	Rp. 1.905.000.000,-
2019	Rp. 1.650.000.000,-
2020	Rp. 390.000.000,-

Sumber: RPJM UPK Kluet Utara, 2020

Berdasarkan tabel di atas pada tahun 2007 jumlah dana bergulir sebesar Rp. 500.000.000; Rp. 3.000.000.000 tahun 2008; Rp. 800.000.000 pada tahun 2009; Rp. 2.750.000.000 ditahun 2010, Rp. 3.000.000.000 tahun 2011 dan Rp. 3.000.000.000

ditahun 2012.Hingga 30 Mei 2013 total dana bergulir yang ada di UPK mencapai Rp. 3.660.453.900; tumbuh dari total dana sebesar Rp. 2.820.450.000. Total dana tersebut tercatat tingkat pengembalian dana SPP yang bergulir dimasyarakat dapat mencapai 99,8%. Oleh Karena itu sebanyak 85 kelompok SPP yang beranggotakan sekitar 950 perempuan. Aneka usaha menjadi jenis usaha terbesar yang didanai disamping menjahit dan kerajinan pembuatan kue yang juga dilakoni oleh para penerima manfaat dana SPP. Sisanya, terdapat 0,02% alokasi SPP yang tingkat pengembaliannya tersendat akibat persoalan *microfinance*.Namun pada tahun 2014 segala kegiatan yang ada pada lembaga PNPM Mandiri Pedesaan baik penyaluran maupun penyelesaian pembiayaan sudah dialihkan dan dipindah tugaskan kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK).

Pada awal terbentuknya UPK Syariah Kluet Utara total dana yang bergulir di tahun 2014 sebesar Rp. 960.700.000,- hingga pada tahun 2019 mencapai Rp. 1.650.000.000,-. Namun pada tahun 2020 jumlah dana yang bergulir mengalami penurunan secara drastis dikarenakan adanya pandemi Covid -19 dengan jumlah dana sebesar Rp. 390.000.000..Alokasi dana untuk program SPP maksimal 25% dari dana Bantuan Langsung Mandiri (BLM). Tidak ada batasan alokasi maksimal per desa, namun harus mempertimbangkan hasil verifikasi kelayakan kelompok. Alokasi dana yang berasal dariBantuan Langsung Mandiri (BLM) untuk program SPP yang diperuntukkan sebagai bantuan modal kerja terhadap usaha

perempuan agar masyarakat dapat meningkatkan produktivitas perekonomiannya. Di samping itu, alokasi pinjaman atau bantuan modal kerja diprioritaskan bagi masyarakat miskin yang memiliki usaha produktif(Wawancara dengan Bapak Sarjana, Ketua UPK Syariah Kluet Utara).

4.2 Persyaratan

Berdasarkan hasil penelitian dokumentasi oleh peneliti pada 11 Desember 2020 bahwa syarat permohonan pembiayaan UPK Kluet Utara:

1. Poto kopi KTP, KK dan buku nikah suami dan istri
2. Pas poto warna 3x4 cm suami dan istri
3. Poto kopi agunan
4. Materai 6000 atas nama agunan sendiri
5. Materai 6000 atas nama agunan saudara
6. Surat keterangan usaha dari kepala desa
7. Surat keterangan berkelakuan baik dari kepala desa
8. Neraca keuangan
9. Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Menurut bendahara UPK (wawancara, 11 Desember 2020) mengatakan bahwa, meski seluruh syarat di atas telah lengkap namun tidak menutup kemungkinan dana langsung cair. Masih ada perlu proses survey lapangan agar pihak peminjam dana benar akan hal yang diajukan tersebut. Setelah melalui survey lapangan,

saatnya penentuan apakah nasabah berhak menerima dana UPK tersebut atau tidak.

4.3 Karakter Responden

Responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah para peserta yang menjadi pemanfaat Simpan Pinjam kelompok Perempuan (SPP) pada UPK PNPM Mandiri Perdesaan. Karakter Responden berdasarkan berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel 4.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Responden	Jumlah	Persentase (%)
Laki-laki	0	0
Perempuan	123	100%

Sumber: Data diolah, 2020.

4.3.1 Keadaan Responden Berdasarkan Usia

Usia merupakan rentang kehidupan yang diukur dengan tahun, dikatakan masa awal dewasa adalah usia 18-40 tahun, dewasa madya adalah 41-60 tahun, dewasa lanjut > 60 tahun (Ilfa, 2010). Umur adalah lamanya hidup dalam tahun yang dihitung sejak dilahirkan. Umur adalah usia individu yang dihitung mulai saat dilahirkan sampai saat berulang tahun. Jenis perhitungan umur atau usia terdiri atas: 1) usia kronologis yaitu perhitungan usia yang dimulai dari saat kelahiran seorang sampai dengan waktu perhitungan usia. 2) usia mental yaitu perhitungan usia yang

didapatkan dari taraf kemampuan mental seseorang (Hardiwinoto, 2011). Tingkat usia responden pada penelitian ini bervariasi, mulai dari berusia 15-20 tahun, 21-25 tahun, 26-30 tahun dan > 30 tahun. Berikut uraian usia responden peserta SPP UPK di Kluet Utara.

Tabel 4.4
Tingkat Usia Responden Peserta SPP UPK PNPM Mandiri
Perdesaan Di Wilayah Kecamatan Kluet Utara, Aceh Selatan
Tahun 2020

Usia	Jumlah Responden	Persentase
15-20 tahun	1	0,8%
21-25 tahun	20	16,3%
26-30 tahun	32	26%
> 30 tahun	70	56,9%
Total	123	100%

Sumber: Olahan Data, 2020

Dari tabel di atas dapat kita lihat yang bahwa, pada tahun 2020 tingkat usia rata-rata yang menggunakan dana SPP UPK PNPM Mandiri Perdesaan di wilayah Kluet Utara Aceh Selatan merupakan berusia >30 tahun dengan jumlah responden 70 atau setara dengan 56,9%. Pada usia 26-30 tahun jumlah responden mencapai 32 orang dengan jumlah persentasenya 26%. Pada usia 21-25 tahun, 20 responden berjumlah 16,3% dan yang paling rendah pada usia 15-20 tahun hanya 1 responden dengan jumlah persentase 0,8%.

4.3.2 Keadaan Responden Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor pendukung untuk meningkatkan kualitas, kreativitas dan tindakan seseorang. Namun

pada kenyataannya masih banyak masyarakat belum mampu untuk menempuh pendidikan. Rahmawati (2016) mengemukakan bahwa taraf pendidikan rendah mengakibatkan kemampuan pengembangan diri terbatas dan menyebabkan sempitnya lapangan kerja yang dimasuki. Tingkat pendidikan responden pada penelitian ini sangat bervariasi dari tidak bersekolah sampai dengan pendidikan tertinggi adalah sarjana.

Tabel 4.5
Tingkat Pendidikan Responden Peserta SPP UPK PNPM
Mandiri Perdesaan di Wilayah Kecamatan Kluet Utara, Aceh
Selatan Tahun 2020

Pendidikan	Jumlah Responden	Persentase (%)
Tidak Sekolah	23	18,9%
Tamat SMP	31	25,2%
Tamat SMA	30	24,4%
Tamat S1	39	31,5%
Jumlah	123	100%

Sumber: Olahan Data, 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan responden peserta UPK-PNPM Mandiri di Kecamatan Kluet Utara, Aceh Selatan tahun 2020 persentase terbesarnya pada pendidikan Sarjana (S1). Responden pendidikan S1 berjumlah 39 responden (31,5%), Sekolah Menengah Pertama (SMP) berjumlah 31 responden (24,2%), Sekolah Menengah Atas (SMA) berjumlah 30 responden (24,4%) dan Tidak bersekolah berjumlah 23 responden (18,9%).

4.3.3 Keadaan Responden Berdasarkan Status

Status merupakan hal terpenting dalam kehidupan manusia, setiap manusia ingin menikmati kehidupan dengan pasangan hidup mereka. Maka status merupakan salah satu yang bisa kita lihat pada keadaan responden. Berikut tabel jumlah responden yang sudah berstatus:

Tabel 4.6
Keadaan Responden Berdasarkan Status

Status	Jumlah Responden	Persentase (%)
Lajang	29	23,6%
Kawin	56	45,5%
Janda/Duda	26	21,1%
Cerai Mati	12	9,8%
Jumlah	123	100%

Sumber: Olahan Data,2020

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa jumlah responden terbanyak adalah yang sudah menikah dengan jumlah 56 responden (45,5%), Lajang 29 responden (23,6%), Janda atau duda 26 responden (21,1%) dan cerai mati berjumlah 12 responden atau setara dengan 9,8%.

4.3.4 Keadaan Responden Berdasarkan Tanggungan

Keluarga merupakan sekelompok sosial terdiri dari sejumlah individu, memiliki hubungan antar individu, terdapat ikatan, kewajiban, tanggung jawab diantara individu tersebut. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas

kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal disuatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan (Wikipedia, 2020). Banyaknya jumlah tanggungan keluarga menjadi penentu banyaknya jumlah dana yang diambil ke pihak UPK PNPM Mandiri Perdesaan Kluet Utara, Aceh Selatan. Berikut tabel jumlah tanggungan keluarga responden.

Tabel 4.7
Jumlah Tanggungan Responden yang Mengambil Dana SPP UPK PNPM Mandiri Perdesaan di Kluet Utara, Aceh Selatan

Jumlah Keluarga	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	13	10,6%
2	22	17,9%
3	37	30,1%
>4	51	41,5%
Total	123	100%

Sumber: Olahan Data, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa, responden rata-rata merupakan yang sudah berkeluarga dengan tanggungan rata-rata di atas empat (>4). Hal tersebut jelas bahwa semakin banyaknya tanggungan keluarga, maka semakin banyak biaya atau dana yang diambil kepada pihak SPP UPK PNPM Mandiri Perdesaan Kluet Utara, Aceh Selatan. Responden yang memiliki keluarga di atas 4 berjumlah 51 responden (41,5%), jumlah keluarga 3 berjumlah 37 responden (30,1%), jumlah keluarga 2 berjumlah 22 responden (17,9%) dan jumlah keluarga 1 orang berjumlah 13 responden atau sekitar 10,6%.

4.3.5 Keadaan Responden Berdasarkan Alamat

Alamat merupakan lokasi. Lokasi adalah tempat atau kediaman seseorang dan sudah menetap di daerah tersebut. Alamat yang dimaksud disini merupakan alamat responden yang menggunakan dana SPP UPK PNPM Mandiri di Kluet Utara, Aceh Selatan. Berdasarkan alamat, responden rata-rata bertempat tinggal di Kluet Utara, Aceh Selatan. Hal ini dapat kita lihat berdasarkan tabel di bawah ini:

Tabel 4.8
Alamat Responden

Alamat	Jumlah Responden	Persentase (%)
Penduduk Kecamatan Kluet Utara	106	86,2%
Penduduk Luar Kecamatan Kluet Utara	17	13,8%
Jumlah	123	100%

Sumber: Olahan Data, 2020

Berdasarkan tabel di atas, dapat kita lihat bahwa responden yang mengambil dana SPP UPK PNPM Mandiri Kluet Utara, Aceh Selatan merupakan warga Kecamatan Kluet Utara dengan jumlah 106 responden (86,2%), sisanya warga yang berada diluar Kluet utara yang berjumlah 17 responden (13,8%).

4.4 Pembahasan

4.4.1 Pendapatan Responden Sebelum dan Sesudah Mendapatkan Bantuan UPK Kluet Utara

Pendapatan merupakan semua penerimaan seseorang sebagai balas jasanya dalam proses produksi. Balas jasa tersebut bisa berupa upah, bunga, sewa, maupun laba, tergantung pada faktor produksi pada yang dilibatkan dalam proses produksi (Sudremi, 2017). Dalam hal ini pendapatan merupakan hasil atau upah yang diterima oleh para responden sebelum menerima dan sesudah menerima bantuan dari pihak SPP UPK PNPM Mandiri Perdesaan di Kluet Utara, Aceh Selatan. Berikut tabel jumlah pendapatan yang responden dapatkan sebelum menerima dana SPP UPK.

Tabel 4.9
Pendapatan Responden Sebelum dan Sesudah Mendapatkan Bantuan SPP UPK PNPM Mandiri

Pendapatan	Sebelum		Sesudah	
	Jumlah Responden	Persentase	Jumlah Responden	Persentase
1-2 Juta/bulan	134 responden	27,6%	21 responden	17,1%
2-3 Juta/bulan	55 responden	44,7%	27 responden	22%
3-4 Juta/bulan	31 responden	25,2%	34 responden	27,6%
>5 Juta/bulan	3 responden	2,4%	41 responden	33,3%
Jumlah	123 responden	100%	123 responden	100%

Sumber: Olahan Data, 2020

Berdasarkan tabel di atas, dapat kita lihat bahwa SPP UPK PNPM Mandiri Perdesaan mendapatkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan responden sebelum menerima bantuan dana SPP UPK PNPM Mandiri Kluet Utara rata-rata 2-3 Juta perbulan setelah mendapatkan bantuan dana SPP UPK PNPM Mandiri Perdesaan >5 juta/bulan. Hal itu dibuktikan pada tabel 4.9, dimana 2-3 juta/bulan berjumlah 55 responden (44,7%), sedangkan setelah menerima bantuan SPP UPK PNPM Mandiri Perdesaan di Kluet Utara, rata-rata pendapatan responden >5 juta/bulan dengan jumlah responden 41.

4.4.2 Peran SPP UPK bagi Ekonomi

Ekonomi adalah aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran dan konsumsi barang dan jasa. Ekonomi secara umum atau secara khusus adalah aturan rumah tangga manajemen rumah tangga (Depdiknas, 2011). Keadaan ekonomi responden bervariasi dari tingkat yang tinggi, menengah dan kecil. Berikut tabel jumlah responden yang menanggapi betapa pentingnya peran SPP UPK bagi responden.

Tabel 4.10
Peran SPP UPK Kluet Utara bagi Ekonomi

Peran PNPM	Jumlah Responden	Persentase (%)
Ya	121	98,4%
Tidak	2	1,6%
Jumlah	123	100%

Sumber: Olahan Data, 2020

Dari tabel di atas, dapat kita lihat bahwa responden mengatakan bahwa dana SPP UPKKluet Utara sangat penting dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari jawaban responden yang menjawab Ya mencapai 121 responden atau setara dengan 98,4% dan 2 orang berpendapat bahwa SPP UPK Kluet Utara tidak berperan dalam mengatasi perekonomian. Hal ini dikarenakan, responden tidak mengembangkan modal usaha dengan baik sehingga responden merasa bahwa SPP UPKKluet Utara tidak berperan dalam mengatasi ekonomi masyarakat. Selain hal yang telah disebutkan, UPK Kluet Utara berperan penting dalam proses mengurangi tingkat kemiskinan, seperti:

1. Meningkatkan taraf hidup,
2. Menciptakan lapangan pekerjaan
3. Meningkatkan pendapatan anggota atau nasabah.
4. Mengembangkan daya usaha
5. Mensejahterakan masyarakat dan
6. Memberdayakan ekonomi masyarakat di Kluet Utara

4.4.3 Pemanfaatan Dana SPP UPK Kluet Utara

Simpan Pinjam kelompok Perempuan (SPP) merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dalam membantu pemberdayaan perempuan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, yaitu melalui pemberdayaan kelompok dalam mengelola dana pinjaman bergulir, yang bertujuan untuk mempermudah akses

dengan pinjaman tanpa jaminan, mempunyai aturan sendiri, berpihak kepada orang miskin, masyarakat langsung dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam kegiatan tersebut. Pemberdayaan perempuan ini dilaksanakan dengan menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus Perempuan (MDKP) dan simpan pinjam khususnya perempuan yang kemudian disingkat menjadi SPP. Berikut dana SPP UPK Kluet Utara, yang dipergunakan responden:

Tabel 4.11
Keadaan Responden Berdasarkan Manfaat

Manfaat	Jumlah Responden	Persentase (%)
Digunakan untuk membeli Kendaraan	9	7,3%
Digunakan untuk modal pertanian	21	17,1%
Digunakan untuk modal perdagangan	88	71,5%
Dan lain-lain	5	4,1%
Jumlah	123	100%

Sumber: Olahan Data, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa, responden rata-rata menggunakan dana SPP UPK Kluet Utara untuk modal perdagangan. Hal itu dapat kita lihat dari angka jumlah responden yang menggunakan modal usaha untuk perdagangan mencapai 88 responden atau sekitar 71,5%. Dilanjutkan dengan modal usaha pertanian berjumlah 21 responden (17,1%), digunakan membeli kendaraan berjumlah 9 responden (7,3%) dan lain-lainnya berjumlah 5 responden (4,1%). Yang dimaksud lainnya disini

adalah seperti untuk keperluan pribadi yang bukan untuk mengembangkan usahanya, contohnya bagi anak dari nasabah memerlukan laptop untuk keperluan kuliah, maka pihak UPK Kluet Utara akan memberikan dana untuk membelinya.

4.4.4 UPK Memberdayakan Masyarakat Mengurangi Kemiskinan

Pemberdayaan ekonomi masyarakat ialah usaha memberi pengetahuan, keterampilan serta menumbuhkan kepercayaan diri serta kemauan kuat dalam diri seseorang sehingga mampu membangun suatu kehidupan sosial-ekonomi yang lebih baik dengan kekuatan sendiri. Singkatnya, pemberdayaan sosial ekonomi bermaksud menciptakan manusia swadaya dalam kegiatan sosial ekonomi. Pemberdayaan ekonomi masyarakat ini pada intinya dapat diupayakan melalui berbagai kegiatan antara lain: pelatihan, pendampingan, penyuluhan, pendidikan dan keterlibatan berorganisasi demi menumbuhkan dan memperkuat motivasi hidup dan usaha, serta pengembangan pengetahuan dan keterampilan hidup dan kerja (Yayasan SPES, 2011). Dalam hal ini bagaimana cara pihak SPP UPK Kluet Utara dalam mengurangi tingkat kemiskinan, bisa kita lihat pada tabel 4.12.

Tabel 4.12
UPK Kluet Utara Memberdayakan Masyarakat Mengurangi Kemiskinan

Peran UPK	Jumlah Responden	Persentase (%)
Memberikan modal usaha	98	79,7%
Memberikan motivasi (penyuluhan) untuk berusaha	8	6,5%
Membimbing masyarakat untuk pelaku usaha	5	4,1%
Semua benar	12	9,8%
Jumlah	123	100%

Sumber: Olahan Data, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa menurut responden UPK Kluet Utara dalam mengurangi tingkat kemiskinan adalah dengan memberikan modal usaha. Hal itu terlihat dari jumlah responden yang memberikan modal usaha mencapai 98 responden atau setara dengan 79,7%, dan terendah adalah membimbing masyarakat untuk pelaku usaha yang hanya mencapai 5 responden atau 4,1%. Dengan mengurangi tingkat kemiskinan dan memberikan modal usaha kepada nasabah, maka akan membantu para ibu-ibu untuk memberdayakan dirinya dan keluarga dari nasabah tersebut.

4.4.5 Jumlah Peningkatan Pendapatan

Peningkatan pendapatan responden bervariasi, dari yang rendah hingga ke tinggi. Berikut tabel 4.13:

Tabel 4.13
Jumlah Peningkatan Pendapatan

Jumlah Peningkatan	Jumlah Responden	Persentase (%)
1-2 Juta/bulan	33	26,8%
2-3 Juta/bulan	35	28,5%
3-4 Juta/bulan	39	31,7%
> 5 Juta/bulan	16	13%
Jumlah	123	100%

Sumber: Olahan Data, 2020

Berdasarkan tabel di atas, dapat kita lihat peningkatan pendapatan responden mencapai 3-4 Juta/bulan. Hal tersebut terlihat dari jumlah responden pada kategori tersebut mencapai 39 responden (31,7%), dilanjutkan dengan 2-3 Juta/bulan berjumlah 35 responden (28,5%), 1-2 Juta/bulan berjumlah 33 responden (26,8%) dan di atas 5 Juta/bulan mencapai 16 responden (13%).

4.4.6 Pelayanan Petugas SPP UPK terhadap Responden

Pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai aktivitas seseorang, sekelompok atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. Moenir (2010) pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. Oleh karena itu pelayanan pihak UPK Kluet Utara sangat diperlukan dalam hal ini, agar responden atau para nasabah mengambil dana pinjaman dalam setiap tahunnya.

Tabel 4.14
Pelayanan petugas SPP UPK terhadap Responden

Tanggapan	Jumlah Responden	Persentase (%)
Baik	112	91,1%
Cukup baik	11	8,9 %
Tidak baik	0	0
Sangat tidak baik	0	0
Jumlah	123	100%

Sumber: Olahan Data, 2020

Berdasarkan tabel di atas, dapat kita lihat bahwa tanggapan responden terhadap pelayanan pihak SPP UPK Kluet Utara, Aceh Selatan adalah baik dengan jumlah 112 responden (91,1%), Cukup baik berjumlah 11 responden (8,9%), Tidak baik 0 dan sangat tidak baik juga 0 responden.

4.4.7 Kendala Responden terhadap Pihak SPP UPK Kluet Utara

Kendala responden terhadap pihak UPK. Berikut tabel 4.15 tentang kendala responden:

Tabel 4.15
Kendala Responden terhadap UPK Kluet Utara

Kendala	Jumlah Responden	Persentase (%)
Proses Pencairan	59	46,8%
Pelayanan	2	1,6%
Pengumpulan Berkas	21	17,1%
Pengembalian Dana	37	30,1%
Lainnya	4	3,3%
Jumlah	123	100%

Sumber: Olahan Data, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa kendala responden terhadap UPK Syariah adalah proses pencairan dana. Proses pencairan dana mencapai 59 responden (46,8%), pengembalian dana berjumlah 37 responden (30,1%), Pengumpulan berkas berjumlah 21 responden (17,1%), pelayanan hanya 2 responden (1,6%), dan lainnya 4 responden (3,3%). Arti dari lainnya disini adalah seperti, kurangnya informasi dari pihak UPK.

4.4.8 Tindakan Pihak SPP UPK terhadap Responden

Tindakan merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan seseorang berupaya untuk dapat memenuhi kebutuhannya, baik lahir maupun bathin agar mencapai kesejahteraan dan kepuasan. Dalam hal ini tindakan merupakan perilaku pihak UPK di Kluet Utara dalam menangani masalah responden jika terlambat mengembalikan cicilan.

Tabel 4.16
Tindakan Pihak SPP UPK terhadap Responden

Tanggapan	Jumlah Responden	Persentase (%)
Marah-marah	9	7,3%
Menambahkan jumlah cicilan	3	2,4%
Lemah lembut	1	0,8%
Memberi peringatan/keringanan	109	88,6%
Lainnya	1	0,8%
Jumlah	123	100%

Sumber: Olahan Data, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa, tindakan SPP UPK Kluet utara terhadap responden sangat baik. Hal itu terlihat pada tanggapan mereka ketika nasabah terlambat dalam mengembalikan cicilan. 88,3% responden menjawab bahwa pihak UPK justru memberi keringanan/peringatan. Tanggapan lainnya yang di maksud disini adalah seperti tidak memberikan kan dana kepada nasabah selamanya.

4.4.9 Hubungan Pihak SPP UPK Kluet Utara dengan Anggota Nasabah

Hubungan merupakan syarat utama untuk keberhasilan suatu komunikasi baik komunikasi antar perorangan maupun komunikasi dalam instansi perusahaan. Dalam hal ini hubungan yang dimaksud adalah hubungan pihak SPP UPK Kluet Utara dengan para responden, berikut tabel 4.17:

Tabel 4.17

Hubungan Pihak SPP UPK Syariah dengan Anggota Nasabah

Hubungan	Jumlah Responden	Persentase (%)
Baik	108	87,8%
Cukup baik	15	12,2%
Buruk	0	0
Buruk sekali	0	0
Jumlah	123	100%

Sumber: Olahan Data, 2020

Berdasarkan tabel di atas, hubungan antara pihak UPK Kluet Utara dengan pihak responden kategori baik dengan jumlah 108 responden (87,7%) dan cukup baik 15 responden (12,2%). Dari

tabel di atas kita dapat menyimpulkan bahwa adanya komunikasi yang baik antara nasabah dan pihak SPP UPK di Kluet Utara dalam hal sikap, tata krama, cara pihak SPP UPK Kluet Utara menjelaskan sistem yang sulit dimengerti oleh nasabah, dan lain-lain.

4.5 Kendala Pihak SPP UPK di Kluet Utara

Walaupun dengan adanya program UPK di Kluet Utara ini sangat membantu masyarakat terutama dalam meningkatkan pendapatan, namun ada beberapa kendala yang terjadi dan menyebabkan kurang terciptanya kesejahteraan dan kemandirian bagi masyarakat, terutama bagi anggota kelompok simpan pinjam. Adapun kendala-kendala tersebut adalah.

Bapak Sarjana merupakan Ketua SPP UPK di Kluet Utara, dibantu oleh Ema Suryani sebagai sekretaris dan Lilis Suryanita merupakan bendahara. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua UPK (tanggal 11 Desember 2020) mengatakan bahwa :

“SPP UPK di Kluet Utara sudah beralih kesyariah. Perubahan dari konvensional menjadi syariah dikarenakan banyaknya keluhan masyarakat yang mengatakan bahwa banyaknya riba dalam sistem Simpan Pinjam Kelompok Perempuan ini”.

Berdasarkan pendapat di atas, pembiayaan modal usaha yang seharusnya membantu mengentaskan kemiskinan menjadi

pembiayaan yang menakutkan bagi nasabah yang mengambil dana tersebut. Masyarakat yang ingin membuka usaha atau menambah penghasilan dalam bidang usaha mereka, justru terkekang dengan bunga yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa SPP UPK yang konvensional beralih menjadi SPP UPK Syariah. Namun dalam SPP UPK Syariah banyak bahasa Perbankan yang sulit dimengerti oleh para nasabah atau masyarakat, seperti halnya “Akad Murabahah”.

Hal ini diungkapkan oleh Bapak ketua UPK (wawancara 11 Desember 2020) mengatakan bahwa:

“Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan dana simpan pinjam di daerah tersebut membuat tersendatnya usaha yang mereka rintis. Misalkan seperti usaha sembako, ketika usaha sembako tidak mempergunakan dana simpan pinjam dengan baik, maka usaha sembako akan menurun. Hal tersebut karena nasabah tidak menggunakan dana simpan pinjam sebagai alat untuk menambah atau menanamkan usahanya”

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan dana Simpan Pinjam kelompok Perempuan ini dengan baik mengakibatkan menurunnya penghasilan masyarakat atau nasabah tersebut. Dapat disimpulkan bahwa, masyarakat yang mengambil dana simpan pinjam SPP tidak memanfaatkan dana yang mereka simpan sebagai modal usaha yang diperlukan.

Dilanjutkan oleh Ibu bendahara UPK (wawancara 11 Desember 2020).

Banyaknya kendala yang lain yang dihadapi oleh pihak SPP UPK, terlebih lagi ketika pengembalian dana.banyak anggota yang menunggak dalam pembayaran, Dimana ketika waktunya pembayaran, terkadang tidak di rumah, terkadang keluar kota, belum ada uang. Pas kami mau tutup buku di akhir tahun, disitu pula dia berulah. Kamipun dituntut harus menyelesaikan semua nasabah yang belum melunaskan.

Pihak UPK tidak hanya mengalami satu kendala saja dalam proses pinjam meminjam dana tersebut, melainkan kendala tersebut melebihi dari satu hal. Pihak UPK kualahan ketika dihadapkan dengan nasabah menunggak, tidak membayar tepat waktu, dan teradang sengaja tidak dirumah hanya untuk menghindari pembayaran angsuran bulanan. Melansir pendapat di atas, menjelaskan bahwa meskipun sudah membuat denda sebesar 5% untuk nasabah yang terlambat melakukan pembayaran, namun nasabah juga tidak membayar sesuai waktu yang telah ditentukan.

Dilanjutkan oleh Ibu Bendahara (wawancara 11 Desember 2020).

”kita mengatasi kendala-kendala ini dengan beberapa cara, seperti cara kekeluargaan, kita telephone, didatangi langsung. Kadang juga kita keluar membawa pendamping seperti tim

verifikasi, tim pendanaan, kadang juga didampingi petugas dari pihak polsek atau pihak koramil”

Sebagaimana yang didapatkan di atas, mengenai kendala-kendala yang dihadapi pihak UPK PNPM Mandiri Pedesaan di Kluet Utara yang pada dasarnya adalah mengarah pada pengembalian dana, SPP UPK PNPM Mandiri Pedesaan di Kluet Utara telah berusaha melakukan upaya-upaya untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Dalam menyikapi kendala-kendala yang terjadi, baik UPK PNPM Mandiri Pedesaan maupun anggota kelompok simpan pinjam masing-masing memiliki strategi dalam menghadapi kendala-kendalanya. Sehingga mereka mengupayakan agar program simpan pinjam dari UPK PNPM di Kecamatan kluet Utara ini tetap berjalan lancar sebagaimana yang diinginkan. Kendala lain yang dihadapi oleh pihak UPK adalah ketika nasabah mangkat atau meninggal dunia, namun dalam keadaan ini ketika nasabah mangkat atau meninggal dunia pihak UPK memberikan asuransi jiwa berupa pemutihan penyetoran, sehingga pihak keluarga tidak berkewajiban membayar setoran kepada pihak UPK.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti laksanakan pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kluet Utara, maka telah diperoleh hasil dari penelitian bahwa UPK memiliki program Simpan Pinjam kelompok Perempuan (SPP) yang di dalamnya berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Kluet Utara, dalam upaya memberdayakan masyarakat Kluet Utara tersebut tentu saja memiliki kendala dimana setiap kendala tersebut, pihak UPK berupaya melakukan penyelesaian, terutama kepada nasabah yang pembiayaannya bermasalah. Oleh karena itu, penelitian yang dapat menjawab rumusan masalah penelitian, diantaranya sebagai berikut:

1. SPP sangat berperan dalam meningkatkan taraf hidup, meningkatkan pendapatan anggota, menciptakan lapangan pekerjaan, mengembangkan daya usaha, mensejahterakan masyarakat, dan memberdayakan ekonomi masyarakat di Kluet Utara guna mengurangi tingkat kemiskinan, hal tersebut terlihat berdasarkan hasil persentase dari kuesioner yang dibagikan kepada nasabah. Jumlah persentase 97,7% merupakan jumlah responden yang menjawab setuju/ya bahwa SPP UPK PNPM Mandiri Perdesaan sangat berperan. Hal ini juga didukung oleh peningkatan

pendapatan para responden yang sebelumnya berada dikisaran 1-2 juta/bulan menjadi >5 juta/bulan.

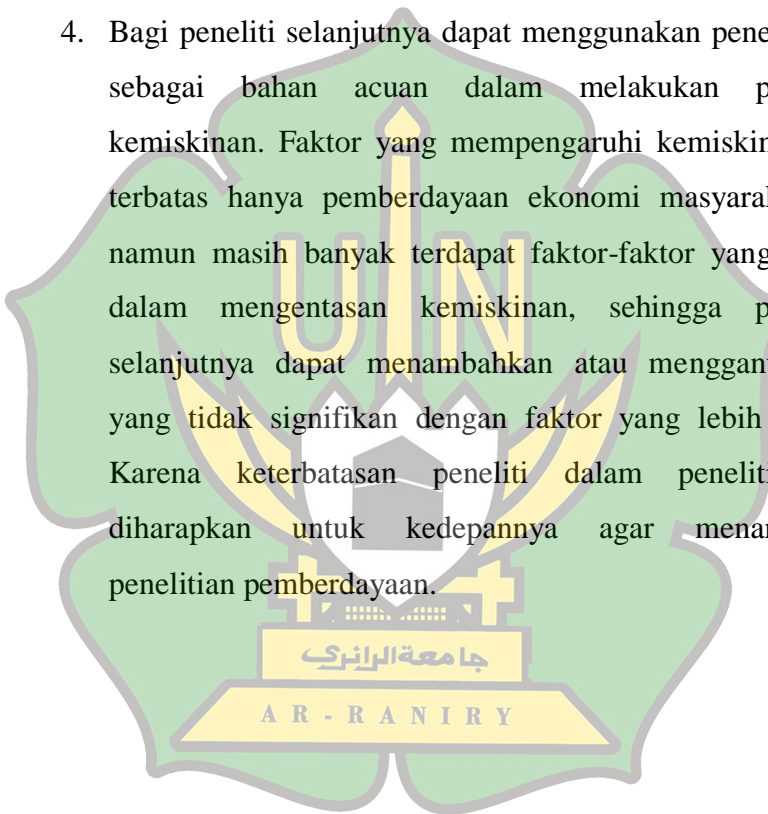
2. Kendala dari pihak SPP UPK Kluet Utara adalah :
 - a. Penunggakan dalam pengembalian dana SPP
 - b. Dana tidak dipergunakan untuk menambahkan modal usaha
 - c. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan dana Simpan Pinjam.

5.2 Saran

1. Bagi masyarakat dapat menjaga hasil-hasil kegiatan UPK Syariah yang merupakan aset yang harus dijaga, diawasi, dipelihara dan dikembangkan. Sebagaimana terdapat sanksi yang telah ditentukan dari pemerintahan bahwa jika hasil kegiatan tidak dikelola dengan baik maka desa maupun kecamatan tidak mendapatkan dana oleh UPK Syariah untuk selanjutnya.
2. Bagi pemerintah dapat menumbuhkan rasa partisipasi masyarakat terhadap program yang pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan melakukan pengawasan secara objektif terhadap hasil kegiatan yang telah dilaksanakan sehingga dapat memberikan manfaat dan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
3. Bagi Pihak UPK Kluet Utara, solusi agar nasabah membayar tunggakan dengan cara mendatangi rumah-

rumah nasabah dengan lebih sering atau setiap hari, meminta nomor telephone keluarga nasabah jika sewaktu-waktu nasabah kabur atau melarikan diri, melakukan survey dengan valid agar data peserta nasabah benar-benar nasabah yang amanah.

4. Bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan penelitian ini sebagai bahan acuan dalam melakukan penelitian kemiskinan. Faktor yang mempengaruhi kemiskinan tidak terbatas hanya pemberdayaan ekonomi masyarakat saja, namun masih banyak terdapat faktor-faktor yang relevan dalam mengentaskan kemiskinan, sehingga penelitian selanjutnya dapat menambahkan atau mengganti faktor yang tidak signifikan dengan faktor yang lebih relevan. Karena keterbatasan peneliti dalam penelitian ini, diharapkan untuk kedepannya agar menambahkan penelitian pemberdayaan.



DAFTAR PUSTAKA

- Apriyanti, Liyana. (2011). *Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan Kota Semarang*. Skripsi: Universitas Diponegoro.
- Arikunto, Suharsimi. (2016). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.(2013).
- Badan Pusat Statistik. (2019).
- Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. (2020).
- Caniago. (2020).*Konsep Pemberdayaan dan Kebijakan Implementasi*. Jakarta: CSIS.
- Cristianto, Bram. (2015). *Pengaruh Keberhasilan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Gundi Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan*. Jurnal Ilmiah:Untag Semarang. Vol. 4, No. 3.
- Departemen Dalam Negeri. (2008). *PTO PNPM-MP*. Jakarta: Tim Koordinasi PNPM-MP.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2011). *KBBI Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. (2014). *PTO PNPM-MP*. Jakarta: Tim Koordinasi PNPM-MP.
- Hadi, Sutrisno. (2015). *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hardiwinoto. (2011). *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta:BPFE.

- Hasanah, Siti, *Pemberdayaan Perempuan Melalui Kegiatan Ekonomi Berkeadilan (Simpan Pinjam Syariah Perempuan)*, (SAWWA-Vol. 9, No. 1 : Oktober 2013).
- Hikmat, Harry. (2010). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Iifa. (2010).Definisi Umur. <http://ilfa.com/2010/01/definisi-umur.html>. [20-10-2020]
- Jayadi,Sukman,Yusup. (2017). *Analisis Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Masyarakat Desa Melalui Program Unit Pengelola Kegiatan (Upk) Untu Membangun Ekonomi Lokal (Studi Kasus Pada Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul*. Skripsi: UAA Yogyakarta.
- Kuncoro. (2013).*Pembangunan dalam Perspektif Gender*. Malang: UMM Press.
- Kusumaningrat. (2009). *Memberdayakan Ekonomi Rakyat Kecil*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Maleong, J. Lexy. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Meyer, Thomas.(2012). *Demokrasi Sosial dan Libertarian, Dua Model yang Bersaing dalam Mengisi Kerangka Demokrasi Liberal*. Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung (FES).
- Moenir. (2010).*Kemiskinan di Negara Berkembang Masalah Krusial Global*. Jakarta: LP3ES.
- Muljono, Djoko. (2012). *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*. Yogyakarta: Andi.
- Nawawi, Hadari. (2008). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nazir, Muhammad. (2015). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nikmah, Faiqatun, Siti. (2017). *Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Pada*

Kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan Di Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati Tahun 2015. Skripsi: Uin Walisongo Semarang.

Pelaksana Tugas Operasional (PTO) PNPMP. (2010).

PNPM Mandiri Perkotaan. (2016). *Petunjuk Teknis Keorganisasian dan Pengawas UPK*.

Polancik. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeta.

Pratama, Ari. (2018). *Analisis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Upk Pnpm Mandiri Dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan Di Aceh Besar (Studi Kasus: Upk Pnpm Mandiri Kecamatan Baitussalam)*. Skripsi: UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Rahmawati. (2016). *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.

Rizki, Dessy. (2018). *Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan (Studi Pada Program Simpan Pinjam Perempuan (Spp) Di Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun*. Skripsi: Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Rohmadani, Sholikin, (2017). *Tinjauan Yuridis Unit Pengelola Kegiatan Sebagai Agen Pemerintah Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan*. Surakarta.

Rosady Ruslan. (2008). *Metode Penelitian (Public Relations Dan Komunikasi)*, Cet. 3. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Safrizal. (2013). *Peranan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Pnpm) Mandiri Dalam Membangun Ekonomi Masyarakat Desa Mengkopot Kecamatan Merbau (Suatu Tinjauan Menurut Ekonomi Syari'ah)*. Skripsi: Uin Sultan Syarif Kasim Riau.

Saragi. (2014). *Pengembangan Masyarakat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Sinaga, Marlina. (2018). *Peranan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Pnpm Mandiri Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir*. Skripsi: Uma Medan.
- Sudremi. (2017). *Kwirausahaan Teori Aplikatif Praktik*. Yogyakarta: Cinta Buku.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. (2019). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Sulaiman, Muslimah. (2018). *Analisis Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Pada Usaha Mikro Dan Perannya Dalam Mengurangi Kemiskinan Ditinjau Menurut Ekonomi Islam*. Skripsi: Uin Ar-Raniry.
- Sumodiningrat, Gunawan. (2011). *Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Supriyanto, Joko. (2019). *Implementasi Simpan Pinjam Perempuan (Spp) Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Desa Balairajo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah*. Skripsi: Uin Raden Intan Lampung.
- Suryabrata, Sumardi. (1997). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suryawati. (2013). *Upaya Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Pengembangan Manajemen Usaha Kecil (Studi deskriptif pada Kegiatan Usaha Kecil Ibu-ibu Desa Wirolegi Kabupaten Jember, Dampingan Pusat Studi Wanita UM Jember)*. Seminar Nasional Ilmu Ekonomi Terapan Fakultas Ekonomi UNIMUS.
- Undang-Undang Dasar No. 17 Tahun 2012. Tentang Perkoperasian Pinjaman.

- Widanarto, Maria Vanney Chinggih Dan Ketut Sudibia. (2016). *Efektivitas Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (Spp) Pnpm Mandiri Perdesaan Di Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung*. E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis: Universitas Udayana
- Yani, Irma. (2018). *Implementasi Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam Di Desa Pematang Tengah Kecamatan Tanjung Pura*. Skripsi: UI Medan.
- Yayasan SPES. (2001). *Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

